



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2023



**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS**

**JL. RAYA PADANG – PAINAN KM. 16, 25245 PADANG SUMATERA BARAT
TELEPON/FAX: (0751) 751122 EMAIL: pps_bungus@yahoo.com**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan "Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Triwulan III Tahun 2023" dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja baik keberhasilannya maupun hal-hal lain yang harus dilakukan peninjauan kembali agar dapat mencapai keberhasilan, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai media pertanggung jawaban, laporan ini berisikan tentang Rencana Strategis tahun 2023, Rencana Kinerja tahun 2023, dan Capaian Kinerja 2023. Seluruh hasil realisasi pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dituangkan secara transparan dan akuntabel dalam Laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna seperti yang diharapkan, untuk itu kami akan terus berupaya menyempurnakan sistem AKIP dan penyajian Laporan Kinerja di masa yang akan datang.

Demikianlah laporan ini kami susun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih.

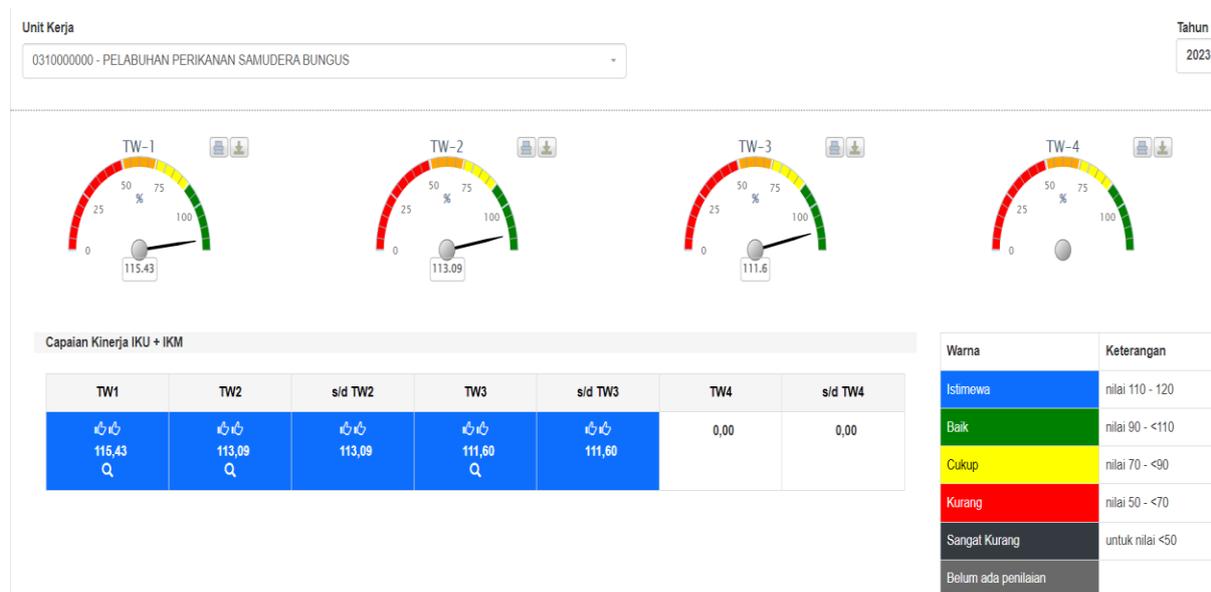
Bungus, 12 Oktober 2023

**Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 14.890.401.000,- untuk Tahun 2023 dimana yang terealisasi sebesar Rp. 10.802.304.670,- atau mencapai 72,55% sampai Semester III Tahun 2023. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja PPS Bungus pada Triwulan III tahun 2023 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KINERJAKU), diperoleh Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Ditjen Perikanan Tangkap sebesar 111.60%.



Gambar 1. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan III PPS Bungus

Dari hasil pengukuran kinerja Dirjen Perikanan Tangkap dan UPT PPS Bungus s/d Triwulan III Tahun 2023 melalui pencapaian target indikator kinerja yang di input ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh Nilai target s/d Triwulan II Tahun 2023 yang mencapai angka lebih atau diatas 100% di semua Indikator Kinerja yang ditargetkan (Indikator Kinerja TW III Terlampir).

Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian Output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome). Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategis berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategis organisasi. Peta Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus s/d Triwulan III tahun 2023 dapat disajikan pada diagram diatas, berdasarkan Dashboard Peta Strategis s/d triwulan III pada Aplikasi Kinerja: www.kinerjaku.kkp.go.id.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
LAMPIRAN	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1. TUGAS DAN FUNGSI	2
1.1.1. SUBBAGIAN UMUM	3
1.1.2. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL.....	3
1.2. SISTEMATIKA PENYAJIAN	4
BAB II	7
PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP	7
2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	8
2.3. PERMASALAHAN.....	13
2.4. RENCANA KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS TAHUN 2023.....	13
2.5. PENETAPAN KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS TAHUN 2022.....	14
BAB III	16
AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	16
3.1.1. <i>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</i>	19
3.1.2. <i>CUSTOMER PERSPECTIVE (OUTPUT)</i>	22
3.1.3. <i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (PROCESS)</i>	34
SS-6 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Berdaya Saing	46
3.1.4. <i>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE (INPUT)</i>	49
A. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	72
BAB IV	73
PENUTUP	73
4.1. KESIMPULAN.....	73
4.2. SARAN	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan IV PPS Bungus	ii
Gambar 2. Struktur Organisasi PPS Bungus Tahun 2022.....	4
Gambar 3. Peta Strategi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2022	9
Gambar 4. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS).....	55

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Rencana Kinerja

Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja

Lampiran 3 : Evaluasi dan Rekomendasi LKJ Triwulan IV

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informasi Cascading/Turunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023	11
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2023.....	13
Tabel 3. Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023 yang mengacu kepada Balanced Scorecard (BSC)	14
Tabel 4. Capaian IKU PPS Bungus hasil Balanced Scorecard (BSC) Tahun 2023	16
Tabel 5. Target dan Realisasi IKU Nelayan Yang Difasilitasi Akses Pendanaan Usaha Tahun 2023	19
Tabel 6. Perbandingan Nelayan Yang Difasilitasi Akses Pendanaan Usaha Tahun 2022 Pada Periode yang sama	20
Tabel 7. Perbandingan Nelayan Yang Difasilitasi Akses Pendanaan Usah dengan Target Menengah	20
Tabel 8 Perbandingan Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usaha di PPS Bungus dengan di PPS Belawan	20
Tabel 9. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Jumlah Nelayan Yang Terfasilitasi Pendanaan Usaha Perikanan Tangkap Di PPS Bungus	21
Tabel 10. Target dan Realisasi Nilai PNBPN di PPS Bungus.....	22
Tabel 11. Perbandingan Nilai PNBPN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Pada Tahun 2022 Pada Periode yang Sama.....	23
Tabel 12. Perbandingan Nilai PNBPN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan Target Menengah	23
Table 13 Perbandingan Penerimaan PNBPN di PPS Bungus dengan PPS Belawan	24
Tabel 14. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai PNBPN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	24
Tabel 15. Target dan Realisasi IKU LPP WPPNRI yang operasional	25
Tabel 16. Perbandingan Lembaga Pengelola Perikanan di WPP 572 yang Operasional dengan target Menengah	26
Table 17 Perbandingan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI PPS Bungus dengan PPS Belawan	26
Tabel 18. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran LPP WPPNRI yang Operasional.....	27
Tabel 19. Target dan Realisasi Laporan Data Logbook di PPS Bungus	28
Tabel 20. Perbandingan Jumlah Laporan Data Logbook di PPS Bungus Pada Tahun 2022 pada periode yang sama.....	28
Tabel 21 Perbandingan Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan yang dikumpulkan dengan target Menengah	29
Tabel 22 Perbandingan Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan PPS Bungus dengan PPS Belawan	29
Tabel 23. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Jumlah Laporan Data Logbook di PPS Bungus	29
Tabel 24. Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus Triwulan II Tahun 2023	31
Tabel 25. Target dan Realisasi Volume Produksi Perikanan Tangkap Di PPS Bungus.....	31
Tabel 26. Perbandingan volume Produksi Perikanan Tangkap Di PPS Bungus Pada Tahun 2022 Pada Periode yang Sama.....	31
Tabel 27. Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di PPS Bungus dengan Target Menengah	32
Tabel 28 Perbandingan Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus dengan PPS Belawan	32

Tabel 29. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	33
Tabel 30. Dokumen Kapal Perikanan yang diterbitkan	34
Tabel 31. Perbandingan Jumlah Dokumen Kapal Perikanan yang diterbitkan Di PPS Bungus Pada Tahun 2022 Pada Periode yang Sama	34
Tabel 32. Perbandingan Jumlah Dokumen Kapal Perikanan yang diterbitkan Di PPS Bungus dengan Target Menengah	35
Table 33 Perbandingan Dokumen Kapal Perikanan yang diterbitkan di PPS Bungus dengan PPS Belawan	35
Tabel 34. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Kapal Perikanan yang diterbitkan Di PPS Bungus.....	36
Tabel 35. Target dan Realisasi Dokumen Awak Kapal Perikanan yang Diterbitkan.....	37
Tabel 36. Perbandingan Dokumen Awak Kapal Perikanan yang Diterbitkan Pada Tahun 2022 Pada Periode yang Sama	38
Tabel 37. Perbandingan Dokumen Awak Kapal Perikanan yang Diterbitkan dengan Target Menengah	38
Table 38 Perbandingan Dokumen Awak Kapal Perikanan yang diterbitkan di PPS Belawan dengan PPS Belawan.....	38
Tabel 39. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Dokumen Awak Kapal Perikanan yang Diterbitkan.....	39
Tabel 40. Target dan Realisasi Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/ Kompetensinya di Bidang Penangkapan Ikan	40
Tabel 41. Perbandingan Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya di Bidang Penangkapan Ikan Pada Tahun 2022 Pada Periode yang Sama	41
Tabel 42. Perbandingan Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya di Bidang Penangkapan Ikan dengan Target Menengah	41
Tabel 43 Perbandingan Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/ Kompetensinya di Bidang Penangkapan Ikan Pada PPS Bungus dengan PPS Belawan	42
Tabel 44. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya di Bidang Penangkapan Ikan	42
Tabel 45. Target dan Realisasi Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Untuk Menunjang PNBK Perikanan Tangkap.....	44
Tabel 46. Perbandingan Jumlah Pelabuhan Perikanan yang Ditingkatkan Fasilitasnya untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur Pada Tahun 2022 Pada Periode yang Sama	44
Tabel 47. Perbandingan Pelabuhan Perikanan yang Ditingkatkan Fasilitasnya untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur Pada Tahun 2022 dengan Target Menengah	45
Tabel 48. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Pelabuhan Perikanan yang Ditingkatkan Fasilitasnya untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur	45
Tabel 49. Target dan Realisasi Tingkat Operasional PPS Bungus	46
Tabel 50. Perbandingan Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Pada Tahun 2022 Pada Periode yang Sama	47
Tabel 51. Perbandingan Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan Target Menengah.....	47
Table 52 Perbandingan Tingkat Operasional PPS Bungus dengan PPS Belawan	47

Tabel 53. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	48
Tabel 54. Target dan Realisasi Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan	49
Tabel 55. Perbandingan Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Pada Tahun 2022 di Periode yang Sama	49
Tabel 56. Perbandingan Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju..WBK Pelabuhan Perikanan dengan target menengah	50
Tabel 57 Perbandingan Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK PPS Bungus dengan PPS Belawan	50
Tabel 58. Analisa Efisiensi Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan	51
Tabel 59. Target dan Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan	52
Tabel 60. Perbandingan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pada Tahun 2022 Pada Periode yang Sama	52
Tabel 61. Perbandingan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dengan target menengah	52
Tabel 62 Perbandingan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan PPS Bungus dengan PPS Belawan	53
Tabel 63. Analisa Efisiensi Presentase Penyelesaian Temuan LHP BPK	53
Tabel 64. Target dan Realisasi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	55
Tabel 65. Perbandingan Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Pada tahun 2022 Pada Periode yang Sama.....	55
Tabel 66. Perbandingan Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan Target Menengah	55
Tabel 67 Perbandingan Nilai Rekonsiliasi Kinerja PPS Bungus dengan PPS Belawan	56
Tabel 68. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	56
Tabel 69. Target dan realisasi IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	58
Tabel 70. Perbandingan IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Pada Periode yang Sama	58
Tabel 71. Perbandingan IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan Target Menengah	59
Tabel 72 Perbandingan IP ASN PPS Bungus dengan PPS Belawan.....	59
Tabel 73. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	60
Tabel 74. Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	61
Tabel 75. Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker PPS Bungus Pada tahun 2022 Pada Periode yang Sama	61
Tabel 76. Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPS Bungus dengan Target Menengah.....	61
Tabel 77 Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPS Bungus dengan PPS Belawan	62
Tabel 78. Analisa Efisiensi Penggunaan Angagran Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPS Bungus.....	63
Tabel 79. Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	64

Tabel 80. Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker PPS Bungus Pada Tahun 2022 Pada Periode yang Sama	64
Tabel 81. Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Bungus dengan Target Menengah	65
Table 82 Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN PPS Bungus dengan PPS Belawan	65
Tabel 83. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Bungus	65
Tabel 84. Target dan Realisasi Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	67
Tabel 85. Perbandingan Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Pada Tahun 2022 Pada Periode yang Sama	67
Tabel 86. Perbandingan Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan Target Menengah	67
Table 87 Perbandingan Nilai IKPA PPS Bungus dengan PPS Belawan.....	68
Tabel 88. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	68
Tabel 89. Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	69
Tabel 90. Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Pada tahun 2022 Pada Periode yang Sama.....	70
Tabel 91. Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan target Menengah	70
Tabel 92 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran PPS Bungus dengan PPS Belawan.....	70
Tabel 93. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	71
Tabel 94. Realisasi Penyerapan Anggaran Untuk Pelaksanaan Kegiatan PPS Bungus Tahun 2023	72

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah salah satu dari 22 buah pelabuhan perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus terletak di Jl. Raya Padang-Painan KM. 16 Kec. Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mempunyai visi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Perikanan Terpadu yang Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Sedangkan Misinya adalah 1) Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Memadai dan Ramah Lingkungan, 2) Meningkatkan Produktifitas, Nilai Tambah (*Value Added*) dan Daya Saing Produk Perikanan Untuk Kesejahteraan Nelayan, 3) Meningkatkan Pengembangan Sistem Data/Informasi Perikanan yang Akurat dan Update. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka disusunlah Rencana Strategis, yang didalamnya tercantum rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan.

Rencana Starategis yang telah disusun, selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada Renstra tersebut, dibuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Dalam rangka mengimplementasikan Renstra, maka disusunlah dokumen Perencanaan Kinerja (RENJA) yang didalamnya tercantum rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan pembiayaan yang dibutuhkan setiap tahun anggaran. RENJA tersebut juga memuat target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan yang dihadapi

yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan ditahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni : (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Mencakup hal tersebut diatas, pada tahun 2023 Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap triwulan dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada RENSTRA 2020-2024. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja PPS Bungus secara bertahap dari Triwulan I sampai dengan triwulan IV dan akan dilanjutkan dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mendukung pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap selama periode tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja tahunan yang dibuat sebelumnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja tahun 2023 ini akan menginformasikan keberhasilan dalam pencapaian indikator selama tahun 2023 sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahunan (RKT) 2023 dan Perjanjian Kinerja.

1.1. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, bahwa pelabuhan perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumberdaya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Sedangkan dalam rangka melaksanakan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan perusahaan sebagai berikut:

a. Fungsi Pemerintahan

- ✓ Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- ✓ Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- ✓ Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- ✓ Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;

- ✓ Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- ✓ Pelaksanaan kesyahbandaran;
- ✓ Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- ✓ Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawaskapal perikanan;
- ✓ Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
- ✓ Pemantauan wilayah pesisir;
- ✓ Pengendalian lingkungan;
- ✓ Kepabeanan; dan/atau
- ✓ Keimigrasian.

b. Fungsi Pengusahaan

- ✓ Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- ✓ Pelayanan bongkar muat ikan;
- ✓ Pelayanan pengolahan hasil perikanan;
- ✓ Pemasaran dan distribusi ikan;
- ✓ Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
- ✓ Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
- ✓ Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
- ✓ Wisata bahari; dan/atau
- ✓ Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan tersebut, maka disusun struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, sebagai berikut :

1.1.1. SUBBAGIAN UMUM

a. Tugas :

Melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

1.1.2. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan

Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing. Dalam pelaksanaan tugas tersebut ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Tugas koordinator tersebut adalah mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

Maka sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut diatas PPS Bungus dengan struktur organisasinya berkewajiban memberikan kinerja yang terbaik bagi perwujudan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan yang di implementasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dievaluasikan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Gambar 2. Struktur Organisasi PPS Bungus Tahun 2023

1.2. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang dilakukan dengan transparan serta sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus selama tahun 2023 akan dibandingkan dengan Rencana Kinerja 2023 yang telah ditargetkan sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Dari analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan dilakukannya proses identifikasi terhadap sejumlah celah kinerja

yang ada bagi perbaikan kinerja di masa datang. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tahun 2023 sebagai berikut :

1. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.

Disebutkan juga langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bab Pendahuluan ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

4. Bab III Akuntabilitas

4.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- e. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

4.2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

5. Bab IV Penutup

Bab Penutup ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

6. Lampiran

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja yang telah di tandatangani oleh Kepala Pelabuhan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selaku penanggung jawab Program memiliki peran strategis, yakni sebagai: (I) penyedia bahan pangan dari perairan yang mempunyai nilai tinggi dari, ditinjau dari aspek nutrisi maupun ekonomi, (II) penyedia lapangan kerja bagi masyarakat di daerah pesisir, (III) salah satu bidang andalan dalam kegiatan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang turut serta dalam menjaga kedaulatan bangsa di laut, (IV) penyumbang potensial untuk mendorong peningkatan penerimaan negara, serta (V) identitas budaya negara maritim yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut:

“Terwujudnya Pembangunan Perikanan Tangkap yang Berdaulat, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan” dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdaulat diartikan sebagai kemampuan penuh untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan untuk digunakan sebesar-besarnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat demi mewujudkan kedaulatan.
2. Mandiri diartikan sebagai keadaan untuk dapat berdiri sendiri tanpa bergantung dengan pihak lain dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Berdaya saing diartikan sebagai keunggulan dan kapasitas yang dimiliki untuk menghadapi persaingan dalam peta kompetisi global dalam pengelolaan sumber daya perikanan.
4. Berkelanjutan dimaksudkan sebagai upaya untuk mengelola dan melindungi sumber daya ikan agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh generasi saat ini dan generasi mendatang.
5. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, khususnya nelayan.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan serta merupakan penjabaran dari misi pembangunan nasional. Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

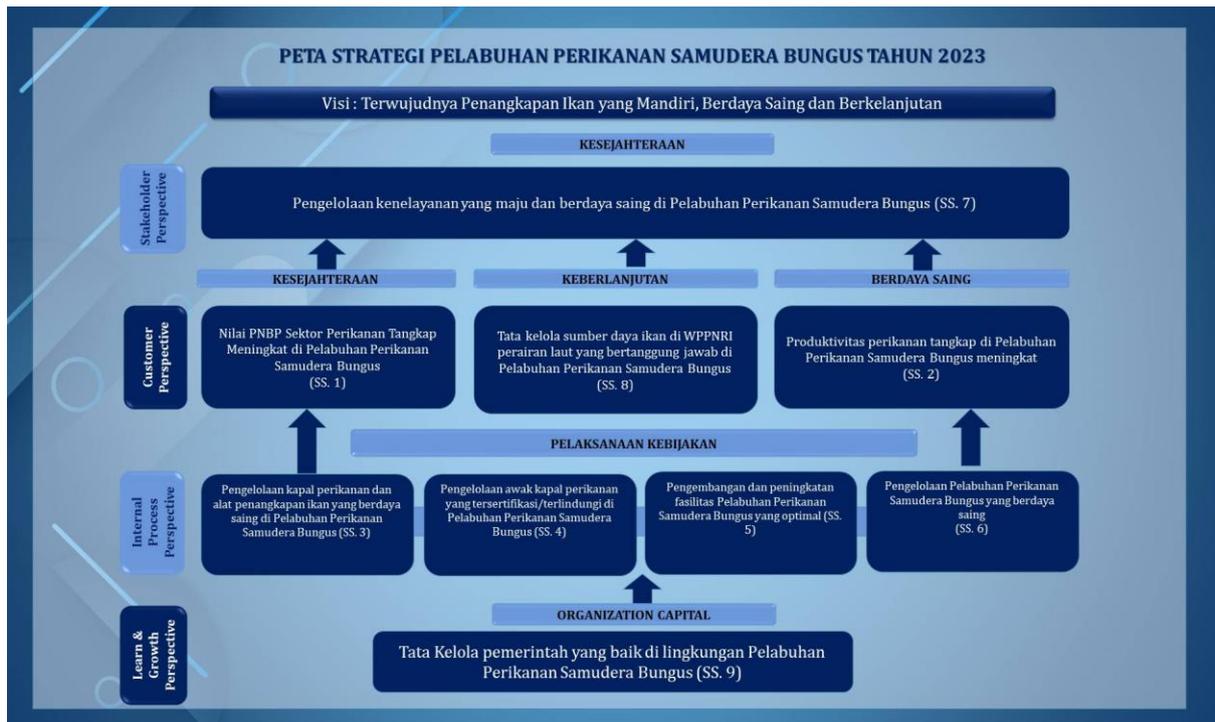
1. Turut serta dalam mewujudkan kedaulatan di laut dengan mengembangkan kegiatan kegiatan yang mempunyai nilai strategis secara sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan dan keamanan;
2. Mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan;
3. Meningkatkan kapasitas dan daya saing dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya ikan;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis telah menyusun rencana kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai guna menjalankan Rencana Strategis yang telah dicanangkan.

Dalam rangka mencapai visi yang tertuang dalam Renstra, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, dan sasaran strategis yang terukur dan dilaksanakan setiap tahun. Selanjutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan rencana kerja tersebut harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan perikanan tangkap yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha perikanan tangkap secara berdaulat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. PPS Bungus perlu menerapkan strategi guna mengimplementasikan tujuan pembangunan perikanan tangkap tersebut, dengan menetapkan Sasaran Strategis yang dapat dipergunakan sebagai acuan selama lima tahun sebagai suatu *outcome/impact* dari program dan kegiatan yang dilaksanakan.



Gambar 3. Peta Strategi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2023

Sasaran Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan bagian dari Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi, dengan pengukuran dan penilaian kinerjanya berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Adapun Sasaran Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang terbagi dalam 4 (tiga) perspektif, yaitu:

1. *Stakeholder Perspective*

Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah Pengelolaan kenelayanan yang maju dan berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dengan indikator kinerja berupa Nelayan yang di fasilitasi akses pendanaan usaha.

2. *Customer Perspective (Output)*

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah Ketersediaan data produksi (pelabuhan perikanan) yang akurat dan Sasaran strategis ke delapan (SS-8) yang akan dicapai adalah Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- a. Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (SS-1);
- b. Rata-rata volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (SS-2).
- c. Lembaga pengelola Perikanan di WPP 572 yang operasional (SS-8);
- d. Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (SS-8);

3. *Internal Process Perspective (process)*

Sasaran strategis yang termasuk kedalam *Internal Process Perspective* adalah Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (SS. 3), Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (SS. 4), Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (SS. 5), dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berdaya saing (SS. 6) dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (SS-3);
- b. Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (SS-4);
- c. Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha (SS-4);
- d. Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus untuk menunjang PNBP perikanan tangkap (SS-5);
- e. Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (SS-6).

4. *Learning and Growth Perspective (input)*

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksanakannya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* di PPS Bungus. Untuk mendukung hal tersebut, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang akan dicapai, yaitu adanya Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan;
- b. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK;
- c. Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus;
- d. IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks);

- e. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus;
- f. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus;
- g. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus;
- h. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus;
- i. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Informasi cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) Level I Kepada Bawahan (Level II), seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Informasi Cascading/Turunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	FREKUENSI	POLA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Nilai PNPB Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Penerimaan PNPB di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta)	1.337	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Kelompok Kerja TKPU dan TU
2.	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	5.770	Triwulan	Akumulasi	Kelompok Kerja OPK
3.	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	50	Tahunan	Akumulasi	Kelompok Kerja OPK
4.	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	1	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Kelompok Kerja OPK
		Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan (orang)	30	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Kelompok Kerja OPK
5.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal	Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur (Unit)	1	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Kelompok Kerja TKPU
6.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berdaya saing	Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	83	Triwulan	Rata-Rata	Kelompok Kerja TKPU
		Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya (Lembaga)	2	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Kelompok Kerja OPK
7.	Pengelolaan kenelayanan yang maju dan berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	20	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Kelompok Kerja TKPU
8.	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah	1	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Kelompok Kerja OPK

	laut yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (Lembaga)				
		Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan (Laporan)	220	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Kelompok Kerja OPK
9.	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan (nilai)	45,10	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Semua Kelompok Kerja
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	75	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Kasubag Umum
		Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	93	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Kasubag Umum
		IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	80	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Semua Kelompok Kerja
		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	77,5	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Kasubag Umum
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	77,5	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Kasubag Umum
		Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	89	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Kasubag Umum
		Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	82	Semester	Nilai Posisi Akhir	Kasubag Umum

Dalam mewujudkan Sasaran Strategis diatas, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah mengamankan satu program utama yang menaungi seluruh kegiatan perikanan tangkap, yakni “Pengelolaan Perikanan Tangkap”. Dari Program utama tersebut telah dijabarkan kembali ke dalam 5 (lima) Kegiatan, yaitu:

1. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat penangkapan Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan;
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
3. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan;
4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Perikanan Tangkap;

2.3. PERMASALAHAN

Target indikator kinerja pada Semester I dapat terealisasi dengan baik dengan tingkat persentase lebih dari 100%, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat permasalahan yang berarti yang dapat menghambat pencapaian target IKU di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Semester I.

2.4. RENCANA KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS TAHUN 2023

Untuk mengukur realisasi dan rencana strategis, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai sehingga lebih terarah dan terkendali. Target ini dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2023. Hal ini ditetapkan untuk setiap indikator kinerja baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan yang merupakan penjabaran dari program-program yang telah disusun sebelumnya, guna pencapaian sasaran yang sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun Rencana kinerja tahunan 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran 2023 (Rp.)
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap			3.132.266.000,-
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawasan Kapal Perikanan	Terselenggaranya Tata Kelola pemanfaatan UPT Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Berdaya Saing dan berkelanjutan	376.400.000,-
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan UPT Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang profesional dan partisipatif	2.597.616.000,-
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	Meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP secara akuntabel dan tepat waktu	4.000.000,-
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Meningkatnya kapasitas pengelolaan SDI secara berkelanjutan	154.250.000,-
Program Dukungan Manajemen			11.758.135.000,-
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	Terkelolanya anggaran pembangunan UPT Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus secara efisien dan akuntabel	11.758.135.000,-

2.5. PENETAPAN KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS TAHUN 2022

Penetapan Kinerja yang telah disusun oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan serta Sasaran Strategis yang telah disusun dalam rangka mendukung visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024.

Sasaran Strategis (SS) dikelompokkan kedalam empat perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customers perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) PPS Bungus pada tahun 2023, untuk semua sasaran strategis berjumlah 9 SS dan 19 IKU. Sasaran strategis ini merupakan suatu panel instrumen yang memetakan sasaran strategis ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi PPS Bungus. Sasaran strategis ini berfungsi untuk memudahkan PPS Bungus untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya dalam rangka menyukseskan pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai oleh PPS Bungus sasaran strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023 yang disusun pada awal tahun 2023 berdasarkan *Balanced Scorecard* (BSC) PPS Bungus, dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023 yang mengacu kepada *Balanced Scorecard* (BSC)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	1	Penerimaan PNBPN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta)	1.337
2.	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	5.770
3.	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	3	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	50
4.	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	4	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	1
		5	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuannya/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan (orang)	30
5.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal	6	Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur (Unit)	1

6.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berdaya saing	7	Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	83
		8	Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya (Lembaga)	2
7.	Pengelolaan kenelayan yang maju dan berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Bungus	9	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	20
8.	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	10	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (Lembaga)	1
		11	Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan (Laporan)	220
9.	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	12	Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan (nilai)	45,10
		13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	75
		14	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	93
		15	IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	80
		16	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	77,5
		17	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	77,5
		18	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	89
		19	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	82

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dengan beralihnya pengelolaan kinerja KKP, yang telah mengimplementasikan manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC), PPS Bungus dalam hal ini merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Ditjen Perikanan Tangkap ikut serta dalam melaksanakan Visi, Misi, dan Tujuan yang ingin dicapai oleh Ditjen Perikanan Tangkap dengan melaksanakan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diturunkan oleh DJPT maupun yang ditetapkan sendiri oleh PPS Bungus.

Tabel 4. Capaian IKU PPS Bungus hasil *Balanced Scorecard* (BSC) Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET				REALISASI			% CAPAIAN
			TAHUNAN	TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III	
1. Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	1	Penerimaan PNBPN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta)	1.337							
2. Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	5.770	1.440	1.440	1.440	2.158,7	1.783,7	1.536,6	106,7
3. Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	3	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	50							
4. Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	4	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	1							
	5	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuannya/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan (orang)	30							
5. Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal	6	Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur (Unit)	1							

6.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berdaya saing	7	Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	83	83	83	83	84,42	84,17	84,86	102,24
		8	Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya (Lembaga)	2							
7.	Pengelolaan kenelayanan yang maju dan berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	9	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	20							
8.	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	10	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (Lembaga)	1							
		11	Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan (Laporan)	220	55	55	55	171	124	127	230,9
9.	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	12	Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan (nilai)	45,10							
		13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	75	75	75	75	100	100	78.12	104,16
		14	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	93							
		15	IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	80		75			69,1		97,32

	16	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	77,5							
	17	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	77,5							
	18	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	89		82			95,87		116,91
	19	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	82							

Pembahasan masing-masing indikator akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Membandingkan realisasi indikator triwulan III tahun 2022 terhadap target capaian triwulan III tahun 2023;
2. Membandingkan realisasi indikator tahun 2023 terhadap target tahun 2023;
3. Membandingkan realisasi indikator tahun 2023 terhadap target indikator tahun 2023 yang merupakan awal RPJMN dan tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJMN. Hal ini didasarkan oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPS/Kepala Bappenas);
4. Membandingkan realisasi indikator tahun 2023 terhadap target indikator yang sifatnya standar nasional (apabila ada) dengan tujuan untuk mengukur pencapaian PPS Bungus terhadap capaian Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan capaian nasional;
5. Menyajikan analisa (penyebab) terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target tahun 2023 berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator;

6. Menyajikan besarnya jumlah sumberdaya yang digunakan berupa alokasi anggaran dalam upaya mencapai target indikator tahun 2023 sesuai dengan yang terdapat pada dokumen penganggaran (RKAKL). Analisa ini terbatas pada *internal process perspective* dan *learning and growth perspective* dikarenakan kedua perspektif ini sifatnya proses dan input (masukan) yang dapat langsung diukur efeknya terhadap pencapaian indikator, sedangkan kedua perspektif lainnya yakni *stakeholder perspective* dan *costumer perspective* merupakan dampak atau hasil dari pencapaian indikator;
7. Menyajikan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target indikator tahun 2023.

3.1.1. STAKEHOLDER PERSPECTIVE

SS-7 Pengelolaan kenelayanan yang maju dan berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah Pengelolaan kenelayanan yang maju dan berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya.

1. Nelayan Yang difasilitasi Pendanaan Usahanya

a. Target dan Realisasi

Indikator nelayan yang difasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan kegiatan untuk penyediaan pojok pendanaan untuk stackeholder yang akan melaksanakan konsultasi terkait kredit perikanan dipojok pendanaan tersebut. Adapun realisasi untuk IKU ini ditargetkan pada TW IV tahun dengan jumlah tagret sebanyak 20 nelayan.

Tabel 5. Target dan Realisasi IKU Nelayan Yang Difasilitasi Akses Pendanaan Usaha Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023 (Nelayan)	Target TW III (Nelayan)	Realisasi TW III (Nelayan)	Persentase Capaian TW III (%)	Persentase Capaian dari Target Tahunan (%)
Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	20	-	-	-	-

Belum terdapat realisasi untuk IKU nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya pada Triwulan III, sehingga persentase capaian untuk IKU ini pada Triwulan III belum dapat dihitung.

b. Perbandingan Pada Tahun 2022 Pada Periode yang sama

Tabel 6. Perbandingan Nelayan Yang Difasilitasi Akses Pendanaan Usaha Tahun 2022 Pada Periode yang sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Kenaikan/Penurunan (%)
	2022	2023	2022	2023	
Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	24	20	24	-	-

Indikator Kinerja Utama nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya pada triwulan III tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 pada periode yang sama karena terdapat perbedaan waktu realisasi pelaksanaan kegiatan.

c. Perbandingan dengan target Menengah

Tabel 7. Perbandingan Nelayan Yang Difasilitasi Akses Pendanaan Usah dengan Target Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Triwulan III Tahun 2023	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	-	50	-

Belum terdapat kegiatan untuk realisasi IKU ini pada Triwulan III tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target menengah dalam Renstra.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat dibandingkan dengan target Nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Tabel 8 Perbandingan Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usaha di PPS Bungus dengan di PPS Belawan

PPS Bungus			PPS Belawan			Persentase Perbandingan
Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase	
20 (Orang)	-	-	40 (Orang)	-	-	-

Perbandingan dengan satker lain dilakukan dengan PPS Belawan. Namun perbandingan akan dilakukan pada Triwulan IV karena pengukuran bersifat tahunan.

f. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Belum terdapat realisasi capaian untuk IKU ini pada Triwulan III tahun 2023, sehingga belum dapat dilakukan analisa keberhasilan dan kegagalan untuk IKU ini pada Triwulan III.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1) Anggaran

Tabel 9. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Jumlah Nelayan Yang Terfasilitasi Pendanaan Usaha Perikanan Tangkap Di PPS Bungus

Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Presentase Terhadap Anggaran (%)
4.000.000	1.800.000	45%

Sampai dengan Triwulan III tahun 2023 telah terdapat realisasi anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 1.800.000 atau sebesar 45% dari total pagu anggaran untuk IKU ini. Realisasi anggaran digunakan untuk Insentif Koordinator Fasilitas Pendanaan Usaha di Pelabuhan Perikanan.

2) Sumber Daya Manusia

Kegiatan pendanaan usaha nelayan dilaksanakan oleh tim dari Pelayanan Usaha, sebanyak 3 orang petugas. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala, bekerja sama dengan lembaga keuangan yakni Bank BRI. Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi nelayan yang terkait dengan kegiatan di Kelompok OPK, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

h. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Komponen kegiatan yang menunjang IKU ini adalah adanya evaluasi penyaluran pendanaan usaha nelayan. Kegiatan pendanaan usaha nelayan ini didukung oleh program pengelolaan perikanan dan kelautan kegiatan pengelolaan perizinan dan kenelayanan.

3.1.2. CUSTOMER PERSPECTIVE (OUTPUT)

SS-1 Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator penerimaan PNBPN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Indikator Nilai PNBPN PPS Bungus adalah seluruh penerimaan PPS Bungus yang merupakan pelaksanaan dari fungsi perusahaan PPS Bungus sebagai unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBPN PPS Bungus didasarkan pada PP Nomor 75 Tahun 2015 yang diperbaharui dengan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4/PER-DJPT/2017 tentang petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak DI Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan. Ada 11 Jenis pelayanan jasa PNBPN di PPS Bungus, yaitu :

1. Pelayanan Jasa Pas Masuk Harian
2. Pelayanan Jasa Pas Masuk Langganan
3. Pelayanan Jasa Tambat Labuh dan Pelayanan Jasa Kebersihan Kolam
4. Pelayanan Jasa Listrik
5. Pelayanan Jasa Air Bersih
6. Pelayanan Jasa Sewa lahan dan Bangunan
7. Pelayanan Jasa Penyewaan Peralatan
8. Pelayanan Jasa kebersihan Kawasan
9. Pelayanan Jasa Bengkel
10. Pelayanan Jasa Docking
11. Pelayanan Jasa Cold Storage

2. Penerimaan PNBPN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

a. Target dan Realisasi

Indikator nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) merupakan pendapatan yang diperoleh pelabuhan yang berasal dari pelayanan jasa yang berada di Pelabuhan Perikanan.

Tabel 10. Target dan Realisasi Nilai PNBPN di PPS Bungus

Indikator Kinerja	Target 2023 (Juta)	Target TW III (Juta)	Realisasi TW III (Juta)	Persentase Capaian TW III (%)	Persentase Capaian dari Target Tahunan (%)
Penerimaan PNBPN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	1.337	-	1.825	-	136,49

Perhitungan untuk indikator kinerja penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah tahunan, sehingga sampai dengan triwulan III tahun pada tahun 2023 belum dilakukan pengukuran dan pelaporan capaian kinerja. Akan tetapi, setiap triwulan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja sebagai upaya menghindari ketidaktercapaian target tahunan. Sampai dengan triwulan III Tahun 2023, capaian indikator kinerja penerimaan PNBP di PPS Bungus sebesar Rp. 1.825,45 juta atau sebesar 136,49% dari target tahunan. Penerimaan PNBP di PPS Bungus paling besar berasal dari Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan.

b. Perbandingan Dengan Tahun 2022 Pada Periode yang sama

Tabel 11. Perbandingan Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Pada Tahun 2022 Pada Periode yang Sama

Indikator Kinerja	Realisasi		Persentase Kenaikan/Penurunan (%)
	2022	2023	
Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Rp. (Juta)	1.665,9	1.825,45	11,87

Apabila dilakukan perbandingan persentase capaian tahun 2023 dengan persentase capaian tahun sebelumnya, penerimaan PNBP mengalami peningkatan sebesar 11,87%. Peningkatan penerimaan ini paling signifikan berasal dari penerimaan jasa tambat, jasa docking dan pembayaran sewa rumah dinas. Dimana penerimaan jasa tambat labuh yang tinggi pada Triwulan III tahun 2023 dikarenakan adanya kegiatan bongkar muat kapal non perikanan di PPS Bungus sehingga PPS Bungus mendapatkan penerimaan dari penagihan jasa tambat labuh kapal non perikanan tersebut.

c. Perbandingan dengan target Menengah

Tabel 12. Perbandingan Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan Target Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Triwulan III 2023	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Rp. (Juta)	1.825,45	1000	182,5

Jika dibandingkan dengan target Penerimaan PNBP triwulan III dengan target dalam renstra 2024, capaian sampai dengan triwulan III tahun 2023 adalah sebesar 182,5%.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat dibandingkan dengan standar Nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Table 13 Perbandingan Penerimaan PNBP di PPS Bungus dengan PPS Belawan

PPS Bungus			PPS Belawan			Persentase
Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase	Perbandingan
1.337 (Rp. Juta)	-	-	1.835,96 (Rp. Juta)	-	-	-

Perbandingan dengan satker lain dilakukan dengan PPS Belawan. Namun perbandingan akan dilakukan pada akhir tahun karena metode pengukuran indikator kinerja Penerimaan PNBP adalah tahunan.

f. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan capaian Penerimaan PNBP sampai dengan triwulan III tahun 2023 sebesar 136,49% dari target didukung oleh komitmen dari petugas pelayanan dalam pelayanan jasa dan penagihan atas jasa pelayanan kepada stakeholder. Pencapaian target ini juga didukung oleh adanya kenaikan tarif PNBP sesuai dengan PP No. 85 Tahun 2021.

Faktor yang dapat menghambat penerimaan PNBP ini salah satunya karena pemilik kapal yang masih kurang memahami penghitungan pembayaran jasa tambat labuh, selain itu masih adanya nelayan yang tidak patuh dalam melaporkan kedatangan dan keberangkatan kapal serta kepemilikan dokumen.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1) Anggaran

Tabel 14. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Anggaran	Realisasi (Rp.)	Persentase Terhadap Anggaran (%)
30.000.000	27.822.742	92,74

Sampai dengan Triwulan III tahun 2023 telah terdapat realisasi anggaran untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebesar Rp. 27.822.742 atau sebesar 92,74% dari total pagu anggaran untuk IKU ini. Realisasi anggaran digunakan untuk kegiatan Perjalanan dalam rangka sosialisasi penerapan PNBP Pasca Produksi.

2) Sumber Daya Manusia

Pencapaian IKU Nilai PNBP PPS Bungus, didukung oleh Tim Petugas Pelayanan Publik, yang terdiri dari 11 orang pegawai petugas Pelayanan Jasa PNBP. Terdapat pegawai yang memegang lebih dari satu jenis pelayanan Jasa. Pencapaian indikator kinerja ini juga didukung oleh adanya aplikasi Sistem Jasa Kepelabuhanan (SIJAKA) yang telah terintegrasi dengan aplikasi teman SPB dan Simponi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pembayaran tambat labuh.

h. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan komponen Pendampingan dan Supervisi Operasional dalam menunjang pelaksanaan PNBP pasca produksi/sistem kontrak.

SS-8 Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI Perairan Laut yang Bertanggung Jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yang akan dicapai adalah “Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI Perairan Laut yang Bertanggung Jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

3. Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang Operasional

Indikator yang menunjukkan gambaran tentang upaya/kegiatan pengelolaan sumber daya ikan di perairan pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, laut ZEEL, Laut Lepas yang terkelola pemanfaatan dan sumber daya ikannya (WPP).

a. Target dan Realisasi

Tabel 15. Target dan Realisasi IKU LPP WPPNRI yang operasional

Indikator Kinerja	Target 2023 (Dokumen)	Target TW III (Dokumen)	Realisasi TW III (Dokumen)	Persentase Capaian TW III (%)	Persentase Capaian Tahunan (%)
LPP WPPNRI yang operasional	1	1	1	100	100

Frekuensi pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) LPP WPPNRI yang operasional adalah tahunan. Namun indikator kinerja utama ini telah terealisasi pada triwulan III tahun 2023 dengan capaian 100%.

b. Perbandingan Pada Tahun 2022 Pada Periode yang sama

Tabel 15 Perbandingan Lembaga Pengelola Perikanan di WPP 572 yang Operasional Pada Tahun 2022 Pada Periode yang sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Kenaikan/Penurunan (%)
	2022	2023	2022	2023	
LPP WPPNRI yang operasional	1	1	1	1	100

Apabila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2022 dalam periode yang sama, terlihat bahwa terdapat konsistensi dalam hasil pencapaian, yakni satu kegiatan telah terlaksana atau mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

c. Perbandingan dengan target Menengah

Tabel 16. Perbandingan Lembaga Pengelola Perikanan di WPP 572 yang Operasional dengan target Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Triwulan III 2023	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
LPP WPPNRI yang operasional	1	1	100%

Dalam hal ini persentase capaian LPP WPPNRI yang Operasional dengan target menengah di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Triwulan III tahun 2023 adalah sebesar 100% dan telah mencapai target yang telah ditetapkan.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat dibandingkan dengan target nasional

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Table 17 Perbandingan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI PPS Bungus dengan PPS Belawan

PPS Bungus			PPS Belawan			Persentase Perbandingan
Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase	
1	-	-	1	-	-	-

Perbandingan dengan satker lain dilakukan dengan PPS Belawan. Namun perbandingan akan dilakukan pada akhir tahun karena metode pengukuran indikator kinerja LPP WPPNRI adalah tahunan.

f. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan realisasi IKU ini adalah tercapainya realisasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) WPPNRI 572 yang terdiri atas enam pemerintah provinsi yang meliputi Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, dan Provinsi Banten.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1) Anggaran

Tabel 18. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran LPP WPPNRI yang Operasional

Anggaran	Realisasi (Rp.)	Persentase Terhadap Anggaran (%)
125,000,000	67.842.178	54,27

Sampai dengan akhir Triwulan III tahun 2023, telah terdapat realisasi anggaran sebesar Rp. 67.842.178,- atau sebesar 54,27% dari total anggaran untuk IKU ini pada tahun 2023. Realisasi anggaran untuk IKU ini dialokasikan untuk operasional unit pengelola perikanan LPP WPPNRI 572 mendukung perikanan terukur di zona industri perikanan berupa paket meeting pertemuan lembaga pengelola perikanan WPPNRI.

2) Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator LPP WPPNRI yang operasional didukung oleh tim kerja PPS Bungus yang sebanyak 16 orang pegawai, yang terdiri dari kepala pelabuhan sebagai ketua, kapokja dan kasubpokja PPS Bungus, kesubag umum, APK APBN (2 Orang), Pranata Keuangan APBN (1 Orang), Analis Kesyahbandaran (1 Orang), P3T Pertama (1 Orang), dan Pramubakti (2 orang).

h. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Adapun kegiatan yang menunjang IKU ini adalah adanya operasionalisasi sekretariat lembaga pengelola perikanan WPPNRI dan operasionalisasi lembaga pengelola perikanan WPPNRI.

4. Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan yang Dikumpulkan dan Diverifikasi

Indikator Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan yang telah dikumpulkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan ukuran jumlah unit kapal yang mengisi dan melaporkan logbook penangkapan. Kegiatan yang mendukung IKU ini adalah pengumpulan data logbook penangkapan ikan dan pengolahan dan analisis data logbook penangkapan ikan.

a. Target dan Realisasi

Tabel 19. Target dan Realisasi Laporan Data Logbook di PPS Bungus

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi TW I	Realisasi TW II	TRIWULAN III			Persentase Capaian dari Target Tahunan (%)
				Target	Realisasi	%	
Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan yang dikumpulkan	220	171	124	55	127	230,9	191,92

Berdasarkan informasi yang tertera pada tabel di atas, terlihat bahwa pencapaian Triwulan III melebihi target yang telah ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 230,9%. Selain itu, persentase pencapaian sampai dengan Triwulan III dibandingkan dengan target tahunan mencapai 191,92%. Keberhasilan dalam mencapai target ini adalah hasil dari peran aktif petugas yang secara konsisten mengingatkan nelayan untuk selalu mengisi logbook penangkapan ikan, baik secara manual maupun melalui metode elektronik. Data laporan logbook penangkapan ikan yang terkumpul memberikan dukungan yang signifikan terhadap pencapaian tersebut.

b. Perbandingan Pada Tahun 2022 Pada Periode yang sama

Tabel 20. Perbandingan Jumlah Laporan Data Logbook di PPS Bungus Pada Tahun 2022 pada periode yang sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Kenaikan/Penurunan (%)
	2022	2023	2022	2023	
Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan yang dikumpulkan	55	55	119	127	14,54

Jika dibandingkan dengan pencapaian pada Triwulan III tahun 2022, terdapat peningkatan signifikan sebesar 14,54% dalam pencapaian yang tercapai. Ini menunjukkan bahwa jumlah laporan data logbook penangkapan ikan yang berhasil dikumpulkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mengalami perkembangan yang positif. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan peran proaktif petugas yang secara konsisten memberikan himbauan kepada nelayan dan awak kapal perikanan agar selalu mengisi logbook penangkapan ikan.

c. Perbandingan dengan Target Menengah

Tabel 21 Perbandingan Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan yang dikumpulkan dengan target Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Triwulan III 2023	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan yang dikumpulkan	422	150	281,3%

Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2024, pencapaian hingga Triwulan III tahun 2023 telah mencapai sebesar 281,3%, menunjukkan prestasi yang melebihi target yang telah ditetapkan.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat dibandingkan dengan target Nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Tabel 22 Perbandingan Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan PPS Bungus dengan PPS Belawan

PPS Bungus			PPS Belawan			Selisih Perbandingan
Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase	
220	422	191,8 %	160	988	617,5 %	425,7%

Apabila dibandingkan dengan capaian IKU Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan yang dikumpulkan, maka PPS Bungus memiliki persentase capaian yang lebih rendah dibandingkan dengan PPS Belawan dengan selisih 425,7%.

f. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan dalam mencapai peningkatan jumlah kapal yang menerapkan logbook penangkapan ikan tidak dapat dipisahkan dari kesadaran, ketaatan, dan kontribusi dari para stakeholder, pemilik, pengurus kapal, nahkoda, dan awak kapal perikanan dalam melaporkan hasil tangkapan melalui logbook penangkapan ikan semakin membaik.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1) Anggaran

Tabel 23. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Jumlah Laporan Data Logbook di PPS Bungus

Anggaran	Realisasi (Rp.)	Persentase Terhadap Anggaran (%)
29,250,000	21.402.250	73,17

Dalam menunjang pelaksanaan IKU Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tersedia anggaran sebesar Rp. 29.250.000. Sampai dengan Triwulan III terdapat realisasi anggaran sebesar Rp. 21.402.250,- atau sebesar 73,17% dari total anggaran. Realisasi anggaran untuk IKU ini dialokasikan untuk Perjalanan dalam rangka Monev dan Sosialisasi E-LBPI di Pelabuhan Perikanan Binaan, Sosialisasi Penerapan E-Logbook Penangkapan Ikan dan Sosialisasi, Pengumpulan Dan Verifikasi Data Logbook Penangkapan Ikan.

2) Sumber Daya Manusia

Pencapaian IKU Logbook ini didukung oleh adanya harmonisasi dan kerjasama antar pegawai Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran (OPK) Kegiatan pengumpulan data, entry data, dan pengolahan data logbook penangkapan ikan dilaksanakan oleh petugas dari kesyahbandaran, dan selanjutnya diverifikasi oleh petugas dari operasional pelabuhan.

h. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Kegiatan yang menunjang tercapainya IKU jumlah laporan data logbook penangkapan ikan yang telah di kumpulkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi penerapan E-Logbook Penangkapan Ikan, pengumpulan dan verifikasi data logbook penangkapan ikan, serta koordinasi dan monev E-LBPI di pelabuhan perikanan.

SS-2 Produktifitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Meningkat.

Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Produktifitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

5. Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Volume produksi perikanan tangkap merupakan jumlah produksi perikanan tangkap yang didaratkan di PPS Bungus. Pengumpulan data produksi dilakukan oleh petugas Pendataan di Pelabuhan Perikanan. Pendataan dilaksanakan oleh petugas pendataan terhadap produksi ikan yang didaratkan dengan menggunakan form monitoring data produksi harian. Data yang telah dikumpulkan kemudian diverifikasi, selanjutnya diolah oleh petugas pengelola data, serta dilaporkan secara

berkala, baik harian, bulanan, dan triwulanan sebagai bentuk realisasi produksi perikanan tangkap.

a. Target dan Realisasi

Tabel 24. Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus Triwulan II Tahun 2023

No	Bulan	Volume Jumlah Produksi (Ton)
1	Januari	682,78
2	Februari	613,47
3	Maret	862,43
4	April	589,27
5	Mei	633,57
6	Juni	560,88
7	Juli	609,06
8	Agustus	467,49
9	September	460,01
Total		5.478.96

Tabel 25. Target dan Realisasi Volume Produksi Perikanan Tangkap Di PPS Bungus

Indikator Kinerja	Target 2023 (Ton)	Realisasi TW I (Ton)	Realisasi TW II (Ton)	TRIWULAN III			Persentase Capaian dari Target Tahunan (%)
				Target	Realisasi	%	
Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	5.770	2.158,7	3.942,4	1.440	1.536,56	106,70	94,95

Berdasarkan Tabel 24 dapat diketahui bahwa capaian volume produksi bersifat fluktuasi setiap bulannya, namun tetap dapat mencapai target triwulanan. Berdasarkan tabel 25, dapat diketahui bahwa realisasi volume produksi TW III adalah 1.536,56 ton atau 106,70% dari target triwulan III sebesar 1.440 ton. Sehingga pencapaian IKU Volume Produksi ini sudah mencapai 94,95% jika dibandingkan dengan target tahunan.

b. Perbandingan Pada Tahun 2022 Pada Periode yang sama

Tabel 26. Perbandingan volume Produksi Perikanan Tangkap Di PPS Bungus Pada Tahun 2022 Pada Periode yang Sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Kenaikan/Penurunan (%)
	2022	2023	2022	2023	
Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	446,7	416,3	1.440	1.536,56	-

Tidak dapat membandingkan IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus antara tahun 2022 dengan tahun 2023 karena ada perbedaan dalam metode perhitungan yang digunakan. Pada tahun 2022, target utama indikator kinerja adalah mencapai "rata-rata volume produksi", sementara pada tahun 2023, target utama indikator kinerja berubah menjadi mencapai "jumlah volume produksi".

Namun apabila dilakukan perbandingan dengan mengembalikan metode perhitungan IKU volume produksi perikanan tahun 2022 dari segi jumlah bukan rata-rata, maka dapat dilakukan perbandingan. Jumlah capaian Produksi Perikanan Triwulan III 2022 sebesar 3.746,7 dan capaian produksi pada Triwulan III tahun 2023 adalah sebesar 5.478.96. Dengan demikian dapat diketahui bahwa ada peningkatan jumlah volume produksi pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah armada kapal baru, dan meningkatnya pelaporan hasil tangkapan produksi melalui e-logbook di Pelabuhan Binaan.

c. Perbandingan dengan target Menengah

Tabel 27. Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus dengan Target Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Triwulan III 2023	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	5.478.96	5.770	94,95 %

Apabila dibandingkan dengan target menengah dalam Renstra 2024, persentase perbandingan capaiannya sebesar 94,95%..

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Tabel 28 Perbandingan Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus dengan PPS Belawan

PPS Bungus			PPS Belawan			Selisih Perbandingan
Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase	
5.770	5.478,96	94,95%	10.000	15.519,42	155,19%	60,24%

Apabila dibandingkan dengan PPS Belawan, persentase capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap PPS Bungus memiliki capaian yang lebih rendah dengan selisih 60,24%.

f. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Sinergi dan kolaborasi antara Kelompok Kerja Kesyahbandaran dan Kelompok Kerja Operasional, serta upaya aktif petugas pendataan ikan, telah berkontribusi pada keberhasilan mencapai target produksi perikanan tangkap pada Triwulan III 2023 di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Keberhasilan capaian IKU ini disebabkan oleh :

- Adanya penambahan jumlah armada kapal penangkapan ikan
- Adanya koordinasi, sosialisasi, dan monev E-LBPI di Pelabuhan binaan, sehingga adanya perbaikan dalam proses pencatatan hasil produksi yang semakin akurat dan sesuai dengan regulasi.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1) Anggaran

Tabel 29. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Anggaran	Realisasi (Rp.)	Persentase Terhadap Anggaran (%)
16,000,000	10.753.300	67,21

Pada Tahun Anggaran 2023, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp.16.000.000,- untuk IKU volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Sampai dengan Triwulan III, telah terdapat realisasi anggaran untuk IKU ini sebesar Rp. 10.753.300 atau sebesar 67,21% dari total anggaran

2) Sumber Daya Manusia

Pencapaian IKU ini didukung oleh SDM terdiri dari petugas pendataan produksi, pengelola data perikanan, dan verifikator data produksi yang semuanya berada di sub pokja operasional pelabuhan, sehingga memudahkan koordinasi dan sinkronisasi data produksi.

h. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Kegiatan yang mendukung kinerja Indikator Kinerja Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meliputi pendataan ikan di area pelabuhan dan upaya koordinasi dalam persiapan bahan, pengolahan, verifikasi, validasi, serta analisis data perikanan tangkap. Selain itu, juga dilakukan kegiatan validasi dan sinkronisasi data perikanan tangkap.

3.1.3. INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (PROCESS)

SS-3 Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

6. Dokumen Kapal Perikanan yang diterbitkan

Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kewenangan penerbitan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan, perikanan. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan merupakan surat kapal yang menyatakan bahwa kapal perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan. Setiap kapal perikanan yang akan beroperasi harus memenuhi persyaratan kelaikan kapal perikanan.

a. Target dan Realisasi

Tabel 30. Dokumen Kapal Perikanan yang diterbitkan

Indikator Kinerja	Target 2023 (Laporan)	Target TW III (Laporan)	Realisasi TW III (Laporan)	Persentase Capaian TW III (%)	Persentase Capaian dari Target Tahunan (%)
Dokumen Kapal Perikanan yang diterbitkan	50	-	-	-	-

Belum terdapat realisasi capaian untuk IKU ini pada Triwulan III, karena pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan, sehingga persentase capaian belum dapat dihitung. Akan tetapi, pelaksanaan kegiatan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) telah dilaksanakan sejak awal tahun 2023 dan masih berjalan. Terhitung sampai dengan Triwulan III, jumlah SKKP yang sudah diterbitkan sebanyak 264 Sertifikat yang terbit melalui mekanisme surat edaran maupun reguler.

b. Perbandingan Pada Tahun 2022 Pada Periode yang sama

Tabel 31. Perbandingan Jumlah Dokumen Kapal Perikanan yang diterbitkan di PPS Bungus Pada Tahun 2022 Pada Periode yang Sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Kenaikan/Penurunan (%)
	2022	2023	2022	2023	
Dokumen Kapal Perikanan yang diterbitkan	35	50	-	-	-

Tidak ada perbandingan yang bisa dilakukan antara realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dokumen kapal perikanan yang diterbitkan pada triwulan III tahun ini dengan realisasi capaian pada triwulan III tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh ketidakadaan realisasi capaian untuk IKU tersebut pada triwulan III saat ini. Perbandingan akan dilakukan pada triwulan IV tahun 2023.

c. Perbandingan dengan target Menengah

Tabel 32. Perbandingan Jumlah Dokumen Kapal Perikanan yang diterbitkan Di PPS Bungus dengan Target Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Triwulan II 2022	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
Dokumen Kapal Perikanan yang diterbitkan	-	-	-

IKU Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan merupakan IKU baru di tahun 2022, belum ada di Renstra 2020-2024 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan standar Nasional

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Table 33 Perbandingan Dokumen Kapal Perikanan yang diterbitkan di PPS Bungus dengan PPS Belawan

PPS Bungus			PPS Belawan			Selisih Perbandingan
Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase	
50	-	-	50	-	-	-

Perbandingan indikator dokumen kapal perikanan yang diterbitkan belum dapat dilakukan pada triwulan III, karena pengukuran indikator ini adalah tahunan. Perbandingan akan dilakukan pada triwulan IV tahun 2023.

f. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan IKU ini adalah dengan tercapainya target tahun 2023 yakni sebanyak 50 laporan di akhir tahun 2023. Jika dilihat dari progress penerbitan SKKP sampai dengan triwulan III yakni sebanyak 264 Sertifikat, maka sudah mencapai 528% dari target tahunan. Hal ini didukung dengan pelaksanaan pengecekan kelaikan/pengukuran/pengujian kapal baik di PPS Bungus, di pelabuhan binaan di Pesisir Selatan, Pariaman, Pasaman, Kota Padang, dan Bengkulu.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1) Anggaran

Tabel 34. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Kapal Perikanan yang diterbitkan Di PPS Bungus

Anggaran	Realisasi (Rp.)	Persentase Terhadap Anggaran (%)
350.000.000	79.038.644	22,58%

Untuk mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Dokumen Kapal Perikanan yang diterbitkan, tersedia anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023, realisasi anggaran yang telah terealisasi mencapai Rp. 79.038.644,- atau sebesar 22,58%. Anggaran yang terealisasi pada Triwulan III ini dialokasikan untuk kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaikan, Pengukuran, Pengujian dan Inspeksi Kapal Perikanan komponen implementasi kebijakan dalam bidang kapal perikanan.

2) Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IKU ini, ditetapkan petugas Kelaikan Kapal sebanyak 7 orang pegawai yang telah menerima Diklat petugas kelaikan kapal perikanan. Tujuh petugas tersebut berasal dari jabatan dan tupoksi yang berbeda-beda sehingga adanya rangkap tugas.

h. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Salah satu program/kegiatan yang mendukung kinerja Indikator Dokumen Kapal Perikanan yang diterbitkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah pelaksanaan pemeriksaan kelaikan, pengukuran, pengujian, dan inspeksi kapal perikanan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kapal perikanan yang akan diterbitkan dokumennya memenuhi standar keamanan dan kelayakan yang ditetapkan. Dengan melakukan pemeriksaan yang komprehensif, dapat dipastikan bahwa kapal perikanan tersebut memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan dokumen yang sah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

SS-4 Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

7. Dokumen Awak Kapal Perikanan yang Diterbitkan

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Indikator kinerja ini merupakan pelaksanaan penerbitan dokumen awak kapal perikanan melalui kegiatan sosialisasi dan asistensi pelayanan buku pelaut bagi awak kapal perikanan dan e-PKL. Sosialisasi e-PKL dilaksanakan untuk meningkatkan implementasi PKL bagi awak kapal perikanan dengan layanan e-PKL. Implementasi tersebut sesuai amanah UU Cipta Kerja dan PP Nomor 27 Tahun 2021, dimana setiap awak kapal perikanan yang akan bekerja pada pemilik kapal perikanan, operator kapal perikanan, nahkoda atau agen awak kapal perikanan harus memiliki PKL. Sementara itu, peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja dan PP 27/2021 tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan terkait PKL.

Perjanjian Kerja Laut merupakan kesepakatan antara awak kapal perikanan dengan pemilik kapal perikanan atau operator kapal perikanan atau nahkoda kapal perikanan atau dengan agen awak kapal perikanan yang memuat persyaratan kerja, jaminan kelayakan kerja, jaminan upah, jaminan Kesehatan, jaminan asuransi kecelakaan dan musibah, jaminan keamanan, serta jaminan hukum yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Target dan Realisasi

Tabel 35. Target dan Realisasi Dokumen Awak Kapal Perikanan yang Diterbitkan

Indikator Kinerja	Target 2023 (Dokumen)	Target TW III (Dokumen)	Realisasi TW III (Dokumen)	Persentase Capaian TW III (%)	Persentase Capaian dari Target Tahunan (%)
Dokumen Awak Kapal Perikanan yang Diterbitkan	1	-	-	-	-

Pada Triwulan ini, belum terdapat pencapaian yang dapat direalisasikan untuk Indikator Kinerja Utama dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan. Oleh karena itu, persentase capaian tidak dapat dihitung karena tidak ada pencapaian yang dapat dijadikan acuan. Capaian ini akan dilaporkan pada akhir tahun 2023.

b. Perbandingan Pada Tahun 2022 Pada Periode yang sama

Tabel 36. Perbandingan Dokumen Awak Kapal Perikanan yang Diterbitkan Pada Tahun 2022 Pada Periode yang Sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
	2022	2023	2022	2023	
Dokumen Awak Kapal Perikanan yang Diterbitkan	-	1	-	-	-

Indikator kinerja ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru yang diperkenalkan pada tahun 2023. Oleh karena itu, tidak ada perbandingan yang dapat dilakukan antara realisasi capaian IKU ini dengan capaian pada tahun 2022. Sebagai IKU baru, capaian akan dinilai berdasarkan pencapaian dalam tahun ini, tanpa adanya referensi dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya tidak relevan dalam konteks ini.

c. Perbandingan dengan target Menengah

Tabel 37. Perbandingan Dokumen Awak Kapal Perikanan yang Diterbitkan dengan Target Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Triwulan III 2023	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
Dokumen Awak Kapal Perikanan yang Diterbitkan	-	-	-

IKU Dokumen Awak Kapal Perikanan yang di terbitkan merupakan IKU baru di tahun 2023, belum ada di Renstra 2020-2024 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan standar Nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Table 38 Perbandingan Dokumen Awak Kapal Perikanan yang diterbitkan di PPS Belawan dengan PPS Belawan

PPS Bungus			PPS Belawan			Selisih Perbandingan
Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase	
1	-	-	1	-	-	-

Perbandingan indikator dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan belum dapat dilakukan pada triwulan III, karena pengukuran indikator ini adalah tahunan. Perbandingan akan dilakukan pada triwulan IV tahun 2023.

f. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan asistensi Buku Pelaut bagi Awak Kapal Perikanan (Neayan dan/atau ABK Kapal) dan E-PKL. Faktor penentu keberhasilan indikator Dokumen Awak Kapal Perikanan yang diterbitkan adalah kesediaan Awak Kapal Perikanan dalam mengajukan pembuatan buku pelaut di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Selanjutnya ketersediaan dan komitmen petugas kesyahbandaran sebagai fasilitator penerbitan buku pelaut bagi awak kapal.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1) Anggaran

Tabel 39. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Dokumen Awak Kapal Perikanan yang Diterbitkan

Anggaran	Realisasi (Rp.)	Persentase Terhadap Anggaran (%)
13.400.000	13.376.250	99,82

Untuk mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dokumen Awak Kapal Perikanan yang Diterbitkan, tersedia dana sebesar Rp. 13.400.000,-. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023, anggaran tersebut telah digunakan sebesar Rp. 13.376.250,- untuk mendukung proses penerbitan dokumen awak kapal perikanan. Realisasi anggaran tersebut bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan penerbitan dokumen yang diperlukan bagi awak kapal perikanan.

2) Sumber Daya Manusia

Upaya pencapaian IKU ini dilaksanakan oleh tim kesyahbandaran pelabuhan yang terdiri dari P3T Muda, pengelola syahbandar dan analis kesyahbandaran. Layanan ini telah terintegrasi dengan aplikasi TemanSPB, sehingga dapat mempersingkat waktu pemilik kapal perikanan untuk mendaftarkan awak kapal.

h. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja “Dokumen Kapal yang Diterbitkan” yaitu program pengelolaan perikanan dan kelautan – pengelolaan pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan pengawakan kapal perikanan yang meliputi kegiatan pelaksanaan penerbitan dokumen awak kapal perikanan melalui kegiatan sosialisasi dan asistensi pelayanan buku pelaut bagi awak kapal perikanan dan e-PKL.

8. Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya di Bidang Penangkapan Ikan.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan, kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Salah satu upaya mewujudkan hal tersebut yaitu melalui pengendalian usaha subsektor penangkapan ikan dan usaha subsektor pengangkutan ikan, khususnya tata kelola Kapal Perikanan, alat penangkapan ikan, dan pengawakan Kapal Perikanan agar sesuai dengan daya dukung lingkungan dan potensi sumber daya ikan. Kapal Perikanan sebagai sarana produksi memiliki dua elemen, yakni elemen fisik dan elemen personel. Untuk elemen fisik, Kapal Perikanan harus memenuhi aspek laik laut, laik tangkap, dan laik simpan. Pemenuhan aspek kelaikan elemen fisik kapal perikanan dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan kegiatan operasional Kapal Perikanan. Sementara untuk elemen personel, kapal perikanan harus memenuhi aspek kelaikan pengawakan kapal perikanan, baik dari segi kesejahteraan, kompetensi, disiplin, maupun penempatan/susunan jabatan awak kapal perikanan di Kapal Perikanan. Hal ini dimaksud untuk menjamin dan memastikan keselamatan pelayanan, perlindungan kerja bagi Awak kapal Perikanan, serta keberhasilan operasi penangkapan dan/atau pengangkutan ikan.

Kegiatan pemenuhan kompetensi kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan bagi awak kapal perikanan, selain dilaksanakan melalui diklat, dapat juga dilaksanakan melalui bimbingan teknis dengan dasar hukum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan Pasal 146 sampai dengan pasal 149. Pada tahun 2023 pelaksanaan IKU peningkatan pengetahuan/kompetensi nelayan/awak kapal perikanan dilakukan melalui kegiatan Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN).

a. Target dan Realisasi

Tabel 40. Target dan Realisasi Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/ Kompetensinya di Bidang Penangkapan Ikan

Indikator Kinerja	Target 2023 (orang)	Target TW III (orang)	Realisasi TW III (orang)	Persentase Capaian TW III (%)	Persentase Capaian dari Target Tahunan (%)
Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/ Kompetensinya di Bidang Penangkapan Ikan	30	-	-	-	-

Pada Triwulan ini, belum ada pencapaian yang dapat direalisasikan untuk Indikator Kinerja Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya di Bidang Penangkapan Ikan. Oleh karena itu, persentase capaian tidak dapat dihitung karena tidak ada pencapaian yang dapat dijadikan acuan pada periode ini. Capaian IKU ini akan dilaporkan pada akhir tahun 2023.

b. Perbandingan Pada Tahun 2022 Pada Periode yang sama

Tabel 41. Perbandingan Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya di Bidang Penangkapan Ikan Pada Tahun 2022 Pada Periode yang Sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
	2022	2023	2022	2023	
Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/ Kompetensinya di Bidang Penangkapan Ikan	30	30	-	-	-

Pada Triwulan ini, belum terdapat realisasi capaian yang dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Karena belum ada pencapaian yang terjadi pada periode ini, tidak ada acuan untuk membandingkannya dengan tahun sebelumnya. IKU ini akan dilaporkan secara tahunan sehingga akan dibandingkan pada pada triwulan IV.

c. Perbandingan dengan target Menengah

Tabel 42. Perbandingan Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya di Bidang Penangkapan Ikan dengan Target Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Triwulan III 2022	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/ Kompetensinya di Bidang Penangkapan Ikan	-	-	-

Pada Triwulan ini, belum terdapat realisasi capaian IKU Awak Kapal Perikanan, sehingga persentase capaian tidak dapat dihitung. Karena tidak ada data atau hasil yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan, maka tidak dapat dilakukan penghitungan persentase pencapaian pada periode ini. IKU ini akan dilaporkan secara tahunan sehingga akan dibandingkan pada pada triwulan IV.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan standar Nasional

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Tabel 43 Perbandingan Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/ Kompetensinya di Bidang Penangkapan Ikan Pada PPS Bungus dengan PPS Belawan

PPS Bungus			PPS Belawan			Selisih Perbandingan
Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase	
30	-	-	30	-	-	-

Perbandingan indikator Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/ Kompetensinya di Bidang Penangkapan Ikan belum dapat dilakukan pada triwulan III, karena pengukuran indikator ini adalah tahunan. Perbandingan akan dilakukan pada triwulan IV tahun 2023.

f. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Bimbingan teknis bagi awak kapal perikanan merupakan kegiatan pembinaan bagi nelayan agar memenuhi persyaratan kompetensi bekerja sebagai awak kapal perikanan. PPS Bungus sebagai salah satu lembaga Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Nelayan dimana salah satunya adalah Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN). Keberhasilan capaian IKU ini ditentukan oleh nelayan sebagai pelaku utama. Apabila kesadaran dan kemauan ABK masih rendah dalam upaya peningkatan kompetensinya, tentu akan menghambat proses pelaksanaan bimbingan teknis tersebut.

Selanjutnya, ketersediaan instruktur dan kelengkapan saraa dan prasarana pelaksanaan bimbingan teknis menjadi faktor penentu keberhasilan. Saat ini, PPS Bungus selaku lembaga penyelenggara bimtek telah memiliki 2 orang instruktur. Adanya koordinasi dan kerjasama dengan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan serta Dinas Kota/Provinsi Kelautan dan Perikanan menjadi factor pendukung keberhasilan IKU Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/ Kompetensinya di Bidang Penangkapan Ikan.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1) Anggaran

Tabel 44. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya di Bidang Penangkapan Ikan

Anggaran	Realisasi (Rp.)	Persentase Terhadap Anggaran (%)
13.000.000	11.903.000	91,56

Untuk mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya di Bidang Penangkapan Ikan, tersedia anggaran sebesar Rp. 13.000.000,-. Hingga Triwulan III Tahun 2023, anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 11.903.000,- atau mencapai persentase realisasi sebesar 91,56%. Realisasi anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi dan pembinaan peningkatan pengetahuan dan kompetensi nelayan di bidang penangkapan ikan.

2) Sumber Daya Manusia

Upaya pencapaian IKU Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya di dukung dengan adanya tim yang cakap. Di PPS Bungus, terdapat 2 orang pegawai yang diberi penugasan tambahan dalam pelayanan Sertifikasi Kecakapan Nelayan dari kelompok OPK, satu dari P3T Pertama dan satu analis kesyahbandaran. Dua pegawai tersebut sebagai instruktur bimtek peningkatan kompetensi nelayan. Secara keseluruhan kegiatan bimtek peningkatan kompetensi nelayan ini di dukung oleh seluruh SDM dari OPK.

h. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) adalah kegiatan yang mendukung pencapaian IKU Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya. PPS Bungus sebagai penyelenggara bimtek tersebut bersinergi dengan direktorat KAPI dan Dinas Kota/Kab/Provinsi Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaannya.

Melalui program tersebut, nelayan dan awak kapal perikanan dapat mengikuti bimtek SKN untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka di bidang penangkapan ikan.

SS-5 Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal

Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

9. Pelabuhan Perikanan yang Ditingkatkan Fasilitasnya untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur

IKU Pelabuhan Perikanan yang Ditingkatkan Fasilitasnya untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur merupakan Jumlah Pengembangan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan guna mendukung operasional dan pelayanan pelabuhan. Formula

perhitungan IKU ini adalah Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan Fasilitasnya.

a. Target dan Realisasi

Tabel 45. Target dan Realisasi Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Untuk Menunjang PNBP Perikanan Tangkap

Indikator Kinerja	Target 2023 (Laporan)	Target TW III (Laporan)	Realisasi TW III (Laporan)	Persentase Capaian TW III (%)	Persentase Capaian dari Target Tahunan (%)
Pelabuhan Perikanan yang Ditingkatkan Fasilitasnya untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur	1	-	-	-	-

Periode perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah tahunan, sehingga pada saat ini belum dapat menghitung realisasi capaian untuk Triwulan III. Dalam konteks ini, pencapaian IKU dievaluasi secara keseluruhan pada akhir tahun, dan tidak ada pemantauan capaian yang dilakukan pada tingkat Triwulan. Oleh karena itu, tidak dilakukan perhitungan realisasi capaian pada Triwulan III saat ini.

b. Perbandingan Pada Tahun 2022 Pada Periode yang sama

Tabel 46. Perbandingan Jumlah Pelabuhan Perikanan yang Ditingkatkan Fasilitasnya untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur Pada Tahun 2022 Pada Periode yang Sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Kenaikan/Penurunan (%)
	2022	2023	2022	2023	
Pelabuhan Perikanan yang Ditingkatkan Fasilitasnya untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur	1	1	-	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki periode perhitungan tahunan, sehingga pada Triwulan III belum ada realisasi capaian yang dapat dilaporkan. Dalam konteks ini, evaluasi capaian IKU dilakukan pada akhir tahun, dan capaian untuk setiap triwulan tidak dihitung secara terpisah. Oleh karena itu, belum ada realisasi capaian yang dapat dicatat atau dilaporkan untuk Triwulan III saat ini.

c. Perbandingan dengan target Menengah

Tabel 47. Perbandingan Pelabuhan Perikanan yang Ditingkatkan Fasilitasnya untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur Pada Tahun 2022 dengan Target Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Triwulan III 2023	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
Pelabuhan Perikanan yang Ditingkatkan Fasilitasnya untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur	-	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki periode perhitungan tahunan, sehingga pada Triwulan III belum ada realisasi capaian yang dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Karena belum ada pencapaian yang terjadi pada Triwulan III ini, tidak memungkinkan untuk melakukan perbandingan dengan capaian pada periode sebelumnya. Oleh karena itu, perbandingan dengan periode sebelumnya tidak dapat dilakukan pada saat ini.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan IKU ini adalah dengan tercapainya target jumlah Pengembangan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan sebanyak 1 unit untuk Tahun 2023.

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1) Anggaran

Tabel 48. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Pelabuhan Perikanan yang Ditingkatkan Fasilitasnya untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur

Anggaran	Realisasi (Rp.)	Persentase Terhadap Anggaran (%)
600.880.000	-	-

Untuk mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelabuhan Perikanan yang Ditingkatkan Fasilitasnya untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur, tersedia anggaran sebesar Rp. 600.880.000,-. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023, belum ada realisasi anggaran yang dapat dilaporkan untuk kegiatan terkait IKU ini. Karena belum ada realisasi anggaran, tidak memungkinkan untuk menghitung persentase capaian terhadap total anggaran yang tersedia, serta nilai efisiensi penggunaan anggarannya juga belum dapat dihitung.

2) Sumber Daya Manusia

SDM yang menunjang terlaksananya peningkatan fasilitas pelabuhan adalah sub pokja Tata kelola Sarana dan Prasarana Pelabuhan yang memang menjadi tupoksi dari sub pokja tersebut. Selain itu, pelaksanaan peningkatan fasilitas ini tentu didukung juga oleh KPA, PPK, dan tim PBJ yang bersinergi dan berkoordinasi.

g. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Salah satu kegiatan yang dapat mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah melalui pelaksanaan rehabilitasi fasilitas pelabuhan, seperti pemeliharaan peralatan dan mesin untuk timbangan digital, belanja modal perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan, dan rehabilitasi gedung syahbandar dan rehabilitasi jaringan induk Distribusi air bersih. Namun sampai dengan triwulan II, belum ada kegiatan yang sudah terlaksana, semuanya masih dalam proses persiapan.

SS-6 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Berdaya Saing

Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berdaya saing”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

10. Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

IKU Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan penilaian kegiatan operasional pelabuhan perikanan sesuai keputusan Dirjen No 20/2015 tentang pedoman evaluasi kinerja operasional pelabuhan perikanan yang ada pada aplikasi PIPP. Indikator tingkat operasional di UPT PPS Bungus yang memenuhi standar merupakan persentase jumlah kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan yang tersedia.

a. Target dan Realisasi

Tabel 49. Target dan Realisasi Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Indikator Kinerja	Target 2023 (Persen)	Realisasi TW I (Persen)	Realisasi TW II (Persen)	TRIWULAN III			Persentase Capaian dari Target Tahunan (%)
				Target	Realisasi	%	
Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	83	84,42	84,17	83	84,86	102,24	102,24

Berdasarkan informasi yang tertera dalam tabel di atas, terlihat bahwa capaian realisasi pada Triwulan III telah melampaui target yang ditetapkan.

Persentasenya mencapai 84,86 atau 102,24% jika dibandingkan dengan target Triwulan III dan total target tahunan. Ini menunjukkan bahwa pencapaian melebihi harapan yang telah ditetapkan, baik dalam hal target Triwulan III maupun dalam pencapaian keseluruhan target tahunan.

b. Perbandingan Pada Tahun 2022 Pada Periode yang sama

Tabel 50. Perbandingan Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Pada Tahun 2022 Pada Periode yang Sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Kenaikan/Penurunan (%)
	2022	2023	2022	2023	
Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	82	83	83,08	84,86	0,92

Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III pada tahun 2022, terdapat peningkatan capaian pada IKU Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebesar 0,92%.

c. Perbandingan dengan target Menengah

Tabel 51. Perbandingan Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan Target Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Triwulan III 2023	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	84,86	80	106,07

Dalam perbandingan dengan target menengah yang ditetapkan dalam Renstra, realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus telah mencapai 106,07%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan Target Nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Table 52 Perbandingan Tingkat Operasional PPS Bungus dengan PPS Belawan

PPS Bungus			PPS Belawan			Selisih Perbandingan
Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase	
83	84,86	102,24	83	86,02	103,63	1,39 %

Apabila dilakukan perbandingan dengan PPS Belawan, capaian Indikator Tingkat Operasional PPS Belawan lebih tinggi dibanding PPS Bungus, dengan selisih 1,39% .

f. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah adanya konsistensi dan komitmen dari petugas dalam penyampaian data dan informasi ke dalam aplikasi PIPP. Dengan menjaga konsistensi dalam mengumpulkan, menginput, dan memperbarui data secara tepat waktu, serta memberikan informasi yang akurat dan terpercaya, dapat meningkatkan validitas dan keandalan data yang digunakan untuk mengukur pencapaian IKU. Komitmen petugas dalam memastikan integritas dan kualitas data akan berkontribusi pada keberhasilan capaian IKU yang lebih baik.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1) Anggaran

Tabel 53. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Anggaran	Realisasi (Rp.)	Persentase Terhadap Anggaran (%)
97.380.000	94.609.290	97,15

Pada Tahun Anggaran 2023, untuk mendukung target IKU Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 97.380.000,-. Hingga akhir Triwulan III, terdapat realisasi anggaran sebesar Rp. 94.609.290,-, yang setara dengan persentase realisasi anggaran sebesar 97,15. Dalam triwulan ini, anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas dan operasional Pengelolaan Infrastruktur dan Pelayanan Publik (PIPP) di pelabuhan perikanan.

2) Sumber Daya Manusia

Pencapaian IKU Tingkat Operasional pelabuhan didukung oleh tim PIPP yang bertugas untuk melakukan input data pada masing-masing Kriteria yang dinilai pada aplikasi PIPP, setiap kriteria pada aplikasi PIPP memiliki penanggungjawab yang bias berasal dari kelompok kerja yang berbeda, disesuaikan dengan kriteria tersebut.

h. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Kegiatan yang menunjang tercapainya IKU tingkat operasional pelabuhan perikanan adalah pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di Pelabuhan Perikanan dalam hal pengelolaan dan operasional Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)

3.1.4 LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE (INPUT)

SS-9 Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yang akan dicapai adalah “Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan pelabuhan perikanan samudera bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

11. Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK $\geq 45,10$. IKU Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan merupakan indikator yang menunjukkan nilai capaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK PPS Bungus.

a. Target dan Realisasi

Tabel 54. Target dan Realisasi Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan

Indikator Kinerja	Target 2023 (Nilai)	Target TW III (Nilai)	Realisasi TW III (Nilai)	Persentase Capaian TW III (%)	Persentase Capaian dari Target Tahunan (%)
Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan	45,10	-	-	-	-

Evaluasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) di Pelabuhan Perikanan dilakukan dalam skala tahunan. Oleh karena itu, pada Triwulan III Tahun 2023, belum tersedia data yang cukup untuk melakukan perhitungan dan penilaian terhadap pencapaian IKU tersebut.

b. Perbandingan Pada Tahun 2022 Pada Periode yang sama

Tabel 55. Perbandingan Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Pada Tahun 2022 di Periode yang Sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Kenaikan/Penurunan (%)
	2022	2023	2022	2023	
Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan	-	-	-	-	-

Perhitungan pencapaian IKU Nilai PM (Pemenuhan Minimum) Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dilakukan secara tahunan, oleh karena itu pada Triwulan III Tahun 2023 belum dapat dilakukan perhitungan dan perbandingan dengan tahun 2022.

c. Perbandingan dengan target Menengah

Tabel 56. Perbandingan Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan dengan target menengah

Indikator Kinerja	Capaian Triwulan III 2023	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan	-	85	-

Perhitungan capaian IKU Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan adalah tahunan sehingga untuk triwulan III Tahun 2023 belum dapat dihitung, sehingga tidak dapat pula dibandingkan dengan target menengah dalam Renstra.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Tabel 57 Perbandingan Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK PPS Bungus dengan PPS Belawan

PPS Bungus			PPS Belawan			Selisih Perbandingan
Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase	
45,1	-	-	45,1	-	-	-

Perbandingan indikator Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK belum dapat dilakukan pada triwulan III, karena pengukuran indikator ini adalah tahunan. Perbandingan akan dilakukan pada triwulan IV tahun 2023.

f. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan dari kegiatan ini dapat diukur dengan tercapainya pemenuhan dokumen pendukung WBK yang dinilai berdasarkan jumlah dokumen yang dipenuhi terhadap standard dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan Kep Itjen Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani pada unit kerja di Lingkungan KKP.

Pada tahun 2023, pencapaian indikator nilai capaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK PPS Bungus disesuaikan dengan hasil Penilaian Mandiri

(PM) Unit kerja yang mengacu pada Permenpan 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani birokrasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus melalui penerapan dan pengumpulan data dalam pembangunan zona integritas menuju WBK di Pelabuhan Perikanan Samudera.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1) Anggaran

Tabel 58. Analisa Efisiensi Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan

Anggaran	Realisasi (Rp.)	Persentase Terhadap Anggaran (%)
224.190.000	97.781.900	43,62

Pada Tahun 2023, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 224.190.000 untuk mendukung IKU Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Pelabuhan Perikanan. Hingga akhir triwulan III, jumlah dana yang sudah terserap mencapai Rp. 97.781.900, atau sekitar 43,62% dari total anggaran yang telah dialokasikan untuk Tahun 2023.

2) Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IKU Pembangunan Zona Integritas, Kepala Pelabuhan membentuk tim pendukung yang terdiri dari 35 Pegawai PPS Bungus, baik PNS maupun Pramubakti. Penggunaan SDM ini sudah cukup efisien karena semua pegawai yang melaksanakan tugas pemenuhan dokumen WBK melakukan rangkap pekerjaan diluar tupoksi masing-masing.

h. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Komponen kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah adanya kegiatan persiapan penetapan zona integritas menuju WBK serta pelaksanaan evaluasi dan penetapan organisasi di Lingkungan KKP. Kegiatan persiapan penetapan zona integritas dilaksanakan dalam pada kegiatan pemenuhan dokumen WBK, penguatan komitmen bersama pembangunan zona integritas PPS Bungus.

12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

a. Target dan Realisasi

Tabel 59. Target dan Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja	Target 2023 (Persen)	Realisasi TW I (Persen)	Realisasi TW II (Persen)	TRIWULAN III			Persentase Capaian dari Target Tahunan (%)
				Target	Realisasi	%	
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	75	100	100	75	78,12	104,16	104,16

Realisasi capaian untuk IKU persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Triwulan III mencapai nilai 78,12, capaian ini telah melebihi target Triwulan III sebesar 75 dengan persentase capaian sebesar 104,16%. Capaian ini karena terdapat 32 rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Triwulan II tahun 2023 dan sudah ditinjaklanjuti sebanyak 25 rekomendasi.

b. Perbandingan Pada Tahun 2022 Pada Periode yang sama

Tabel 60. Perbandingan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pada Tahun 2022 Pada Periode yang Sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Kenaikan/ Penurunan (%)
	2022	2023	2022	2023	
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	-	75	-	78,12	-

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2023, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun 2022.

c. Perbandingan dengan target Menengah

Tabel 61. Perbandingan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dengan target menengah

Indikator Kinerja	Capaian Triwulan III 2023	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	-	-	-

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target menengah.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Tabel 62 Perbandingan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan PPS Bungus dengan PPS Belawan

PPS Bungus			PPS Belawan			Selisih Perbandingan
Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase	
75	78,12	104,16	75	100	133,33	29,17%

Untuk indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan, PPS Bungus dan PPS Belawan memiliki target yang sama, yakni 75%. Target ini merupakan target yang sudah ditentukan dari Eselon I. Pada Triwulan III ini, realisasi capaian antara PPS Bungus dan PPS Belawan memiliki selisih yang cukup signifikan, yakni 29,17%, dimana nilai realisasi PPS Belawan lebih tinggi dibanding nilai realisasi PPS Bungus.

f. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan indikator kinerja ini karena terdapat 32 rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Triwulan II tahun 2023 dan sudah ditinjaulanjuti sebanyak 25 rekomendasi.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1) Anggaran

Tabel 63. Analisa Efisiensi Presentase Penyelesaian Temuan LHP BPK

Anggaran	Realisasi (Rp.)	Persentase Terhadap Anggaran (%)
2.340.000	-	-

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.340.000. Namun, hingga akhir Triwulan III, belum terdapat realisasi anggaran yang telah dilakukan untuk mencapai IKU tersebut.

2) Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan subpokja keuangan dan sub bagian umum diberikan tanggungjawab

atas IKU ini, apabila terdapat rekomendasi pengawasan pada tahun 2023, maka akan diselesaikan sesuai penanggungjawab indikator kinerja utama, yakni kepala sub bagian umum. Sampai dengan triwulan I, belum ada data rekomendasi pengawasan dari Inspektorat Jenderal, sehingga belum ada pelaksanaan tindaklanjut.

h. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Kegiatan yang menunjang IKU ini adalah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja pelabuhan. Apabila terdapat rekomendasi pengawasan dari Itjen, maka pemenuhan dokumen tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan adalah kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini.

13. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan turunan dari Indikator kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan merupakan penilaian Kementerian PAN & RB atas akuntabilitas kinerja KKP. Rekonsiliasi kinerja adalah proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pengelola kinerja, menjadi sasaran bersama untuk mengidentifikasi perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja, serta sebagai sarana pendampingan untuk mengawal SAKIP yang lebih baik. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sarana/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Terdapat 4 (empat) aspek penilaian rekonsiliasi kinerja, yakni aspek kepatuhan (bobot 25%), aspek kesesuaian (bobot 25%), aspek ketercapaian (bobot 30%), dan aspek ketepatan (bobot 20%). Nilai rekonsiliasi kinerja PPS Bungus diukur dari hasil penilaian atas implementasi SAKIP di PPS bungus yang di hitung menggunakan kertas kerja rekonsiliasi yang sesuai ketentuan.

a. Target dan Realisasi

Tabel 64. Target dan Realisasi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Indikator Kinerja	Target 2023 (Nilai)	Target TW III (Nilai)	Realisasi TW III (Nilai)	Persentase Capaian TW III (%)	Persentase Capaian dari Target Tahunan (%)
Nilai Rekonsiliasi Kinerja PPS Bungus	93	-	-	-	-

Perhitungan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dilakukan secara tahunan. Oleh karena itu, untuk triwulan III Tahun 2023, belum dapat diukur. Perhitungan tersebut akan dilakukan pada akhir tahun berdasarkan data dan informasi yang relevan.

b. Perbandingan Pada Tahun 2022 Pada Periode yang sama

Tabel 65. Perbandingan Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Pada tahun 2022 Pada Periode yang Sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Kenaikan/Penurunan (%)
	2022	2023	2022	2023	
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	-	93	-	-	-

Indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan IKU baru di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2023, sehingga IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi pada triwulan III tahun 2022.

c. Perbandingan dengan target Menengah

Tabel 66. Perbandingan Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan Target Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Triwulan III 2023	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	-	-	-

IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan IKU baru di tahun 2023, belum ada di Renstra 2020-2024 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Tabel 67 Perbandingan Nilai Rekonsiliasi Kinerja PPS Bungus dengan PPS Belawan

PPS Bungus			PPS Belawan			Selisih Perbandingan
Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase	
93	-	-	93	-	-	-

Perbandingan indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja belum dapat dilakukan pada triwulan III, karena pengukuran indikator ini adalah tahunan. Perbandingan akan dilakukan pada triwulan IV tahun 2023.

f. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan capaian nilai rekonsiliasi ini dihitung dari hasil penilaian atas implementasi SAKIP di DJPT dengan menggunakan instrumen Kertas Kerja Rekonsiliasi sesuai ketentuan. Penilaian implementasi SAKIP ditentukan oleh kualitas dan pemanfaatan informasi kinerja pada unit kerja, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran melalui aplikasi E-SAKIP yang terintegrasi, dan kualitas monev kinerja serta pemanfaatan hasil monev kinerja sebagai umpan balik perbaikan/peningkatan akuntabilitas kinerja. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala merupakan poin penting dalam keberhasilan pencapaian IKU tersebut.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

1) Anggaran

Tabel 68. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Anggaran	Realisasi (Rp.)	Persentase Terhadap Anggaran (%)
44.000.000	31.800.327	72,27

Untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) ini, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 44.000.000,- pada tahun 2023. Hingga akhir triwulan III, jumlah anggaran yang sudah terserap mencapai Rp. 31.800.327,- atau sekitar 72,27% dari total alokasi anggaran tahun 2023. Penyerapan anggaran triwulan III ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemantauan (monev) dan pelaporan program pengelolaan perikanan tangkap.

2) Sumber Daya Manusia

SDM yang mendukung tercapaiannya indikator kinerja ini tergabung dalam Tim Pengelola Kinerja PPS Bungus yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dari masing-masing sub pokja. Selain tim pengelola kinerja pelabuhan, SDM yang

turut berperan adalah pegawai yang tergabung dalam tim PM SAKIP Pelabuhan yang terdiri dari 6 (enam) orang. SDM yang tergabung dalam tim ini merupakan pegawai yang diberikan tugas tambahan, karena memang tidak sesuai dengan tupoksinya.

h. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Komponen kegiatan Perencanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap yang kegiatannya berupa pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengelolaan perikanan tangkap adalah merupakan kegiatan penunjang untuk tercapainya IKU tersebut. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator kinerja ini adalah pelaksanaan penilaian mandiri SAKIP. Hasil penilaian mandiri tersebut dapat dimanfaatkan memanfaatkan secara optimal umpan balik perbaikan peningkatan kinerja.

14. IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

IKU ini adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas diukur menggunakan standar profesionalitas ASN yang terdiri dari empat dimensi, yaitu:

- 1) **Kualifikasi**, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
- 2) **Kompetensi**, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis);
- 3) **Kinerja**, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan

manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;

- 4) **Disiplin**, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.

a. Target dan Realisasi

Tabel 69. Target dan realisasi IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Indikator Kinerja	Target 2023 (Indeks)	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Persentase Capaian dari Target Tahunan (%)
IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	80	-	68,14	-	85,17

Perhitungan capaian IKU IP ASN dilakukan pada periode semesteran, sehingga pada TW III tidak dilakukan perhitungan nilai IP ASN di PPS Bungus. Namun, jika dilihat berdasarkan data pada tabel, diketahui bahwa nilai IP ASN di PPS Bungus sampai dengan semester satu adalah sebesar 85,17% dari total target tahunan. Perhitungan nilai IP ASN di PPS Bungus akan dilakukan pada Triwulan empat tahun 2023.

b. Perbandingan Pada Tahun 2022 Pada Periode yang sama

Tabel 70. Perbandingan IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Pada Periode yang Sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Kenaikan/Penurunan (%)
	2022	2023	2022	2023	
IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	-	-	-	-	-

Perhitungan capaian IKU IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Pada Tahun 2022 adalah tahunan dan dilaporkan secara semesteran, sehingga untuk triwulan III Tahun 2023 belum dapat dilakukan perbandingan.

c. Perbandingan dengan target Menengah

Tabel 71. Perbandingan IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan Target Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Triwulan II 2023	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	-	72	-

Capaian IKU ini dilaporkan secara semesteran, sehingga untuk TW III tidak terdapat capaian. Sementara itu, capaian pada semester I Tahun 2023 dengan target menengah renstra adalah 94,64%. Hal ini mengindikasikan bahwa para ASN telah berhasil mencapai hampir 95% dari tujuan yang ditetapkan dalam Renstra pada periode tersebut.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat dibandingkan dengan Target Menengah.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Tabel 72 Perbandingan IP ASN PPS Bungus dengan PPS Belawan

PPS Bungus			PPS Belawan			Selisih Perbandingan
Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase	
-	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja nilai IP ASN pada Triwulan III tidak dapat dilakukan perbandingan, karena tidak terdapat perhitungan untuk indikator kinerja ini pada Triwulan III. Perhitungan dan perbandingan untuk indikator kinerja ini akan dilakukan pada Triwulan IV tahunj 2023.

f. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Beberapa usaha yang telah dilakukan untuk tercapainya IKU tersebut adalah dengan memberikan kesempatan ASN untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Webinar/ Seminar /Workshop /Magang/Sejenis yang dilaksanakan baik secara daring/laring.

Sementara itu, faktor yang dapat menghambat tercapainya indikator ini adalah kurangnya antusiasme pegawai dalam mengikuti pelatihan secara daring, sehingga beberapa pegawai masih belum mencapai kumulatif 20JP. Dalam upaya mendorong antusiasme pegawai, maka dilakukan pembinaan dan himbauan melalui apel pagi kepada pegawai, agar mengikuti pelatihan yang tersedia tidak hanya offline tetapi terutama daring, khususnya yang tersedia di e-learning KKP.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1) Anggaran

Tabel 73. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Anggaran	Realisasi (Rp.)	Persentase Terhadap Anggaran (%)
52.000.000	45.209.338	86,94

Dalam menunjang pelaksanaan IKU IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tersedia anggaran sebesar Rp. 52.000.000,- sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 jumlah anggaran yang telah terealisasi adalah sebesar Rp. 45.209.338,- atau sekitar 86,94% dari total jumlah anggaran untuk IKU ini pada tahun 2023. Penyerapan anggaran pada Triwulan III dialokasikan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dan penerapan disiplin pegawai, penguatan integritas dan substansi teknis bagi PNS pengangkatan tahun 2023, kegiatan sosialisasi kepegawaian terkait taspem, kode etik dan disiplin pegawai serta kegiatan dalam rangka pembinaan kepegawaian.

2) Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja IP ASN, PPS Bungus didukung oleh seluruh pegawai yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) orang PNS, yang mana setiap pegawai dihimbau untuk dapat mengikuti berbagai macam pelatihan sesuai dengan jenis jabatannya sehingga dapat menunjang nilai IP ASN dari dimensi diklat 20 JP.

h. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Program atau kegiatan yang menunjang IKU IP ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah adanya kegiatan monitoring pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai melalui seminar, diklat, maupun bimbingan teknis baik secara online maupun offline. Kegiatan unit kerja yang menunjang adalah adanya sosialisasi terkait kinerja dan kode etik pegawai, serta peningkatan etos kerja di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

15. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
- 2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
- 3) Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
- 4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

a. Target dan Realisasi

Tabel 74. Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Indikator Kinerja	Target 2023 (Persen)	Target TW III (Persen)	Realisasi TW III (Persen)	Persentase Capaian TW III (%)	Persentase Capaian dari Target Tahunan (%)
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	77,5	-	-	-	-

Perhitungan capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah tahunan sehingga untuk triwulan III Tahun 2023 belum dapat dihitung.

b. Perbandingan Pada Tahun 2022 Pada Periode yang sama

Tabel 75. Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker PPS Bungus Pada tahun 2022 Pada Periode yang Sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Kenaikan/Penurunan (%)
	2022	2023	2022	2023	
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	-	77,5	-	-	-

Periode pelaporan IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah tahunan, sehingga belum dapat dibandingkan pada triwulan III.

c. Perbandingan dengan target Menengah

Tabel 76. Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPS Bungus dengan Target Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Triwulan III 2023	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	-	-	-

Belum terdapat realisasi capaian untuk IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada triwulan III

tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan target menengah dalam Renstra.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Tabel 77 Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPS Bungus dengan PPS Belawan

PPS Bungus			PPS Belawan			Selisih Perbandingan
Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase	
77,5	-	-	77,5	-	-	-

Perbandingan indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa belum dapat dilakukan pada triwulan III, karena pengukuran indikator ini adalah tahunan. Perbandingan akan dilakukan pada triwulan IV tahun 2023.

f. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki kedudukan berarti dalam penerapan pembangunan nasional guna meningkatkan pelayanan publik serta mengembangkan perekonomian baik nasional maupun daerah. Seiring berkembangnya situasi kondisi perekonomian dunia maupun dalam negeri yang tidak menentu akibat pandemi covid-19, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) serta kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan dan penerapan tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Pelaksanaan PBJ mempunyai tugas meliputi :

- Melakukan perencanaan pengadaan barang / jasa pemerintah;
- Pemilihan penyediaan barang/jasa pemerintah;
- Mengelola kontrak penyedia barang/jasa pemerintah
- Mengelola penyedia barang/jasa pemerintah secara swakelola

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh pelaksanaan tugas PBJ yang optimal dan akurat, sehingga persentase capaian target dapat memenuhi 77,5%.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1) Anggaran

Tabel 78. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPS Bungus

Anggaran	Realisasi (Rp.)	Persentase Terhadap Anggaran (%)
8,160,000	5.440.000	66,67

Pada triwulan III terdapat penghapusan dua pagu anggraan untuk indikator kinerja ini, yaitu Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d.Rp. 500 juta dan pagu anggaran Honorarium Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar. Sehingga alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung IKU ini ada sebesar Rp. 8.160.000,-. Selama triwulan III, jumlah anggaran yang terserap sebesar Rp. 5.440.000,- atau 66,67% dari total alokasi anggaran Tahun 2023. Penyerapan anggaran untuk IKU ini pada Triwulan III digunakan untuk honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

2) Sumber Daya Manusia

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh lima orang tim pengadaan, yang terdiri dari satu pejabat pengadaan dan empat orang panitia pengadaan yang mendapatkan penugasan tambahan dari atasan, karena bukan berasal dari jabatan pengelola PBJ.

h. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencaaian indikator kinerja ini masuk dalam program dukungan manajemen internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang terpantau melalui penemuan laporan keuangan dan BMN yang tepat waktu Kegiatan yang menunjang IKU ini adalah terpenuhinya laporan keuangan dan BMN tepat waktu.

16. Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Merupakan Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%);

2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

a. Target dan Realisasi

Tabel 79. Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Indikator Kinerja	Target 2023 (Nilai)	Target TW III (Nilai)	Realisasi TW III (Nilai)	Persentase Capaian TW III (%)	Persentase Capaian dari Target Tahunan (%)
Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	77,5	-	-	-	-

Perhitungan capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah tahunan sehingga untuk triwulan III Tahun 2023 belum dapat dihitung.

b. Perbandingan Pada Tahun 2022 Pada Periode yang sama

Tabel 80. Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker PPS Bungus Pada Tahun 2022 Pada Periode yang Sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Kenaikan/Penurunan (%)
	2022	2023	2022	2023	
Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	-	-	-	-	-

Perhitungan capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah tahunan sehingga untuk triwulan III Tahun 2023 belum dapat dihitung.

c. Perbandingan dengan target Menengah

Tabel 81. Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Bungus dengan Target Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Triwulan II 2023	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	-	-	-

Belum terdapat realisasi capaian untuk IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada triwulan III tahun 2023 tidak dapat dihitung. Dengan demikian tidak dapat dilakukan perbandingan

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Table 82 Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN PPS Bungus dengan PPS Belawan

PPS Bungus			PPS Belawan			Selisih Perbandingan
Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase	
77,5	-	-	77,5	-	-	-

Perbandingan terhadap indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat dilakukan pada Triwulan III, sebab pengukuran untuk indikator ini bersifat tahunan. Evaluasi perbandingan akan dilaksanakan pada Triwulan IV tahun 2023.

f. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan IKU ini adalah apabila persentase target dalam setahun tercapai, yakni 77,5% dan sesuai dengan kelima unsur pengukuran tingkat kepatuhan pengelolaan BMN.

g. Analisa Efisiensi Sumber Daya

1) Anggaran

Tabel 83. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Bungus

Anggaran	Realisasi (Rp.)	Persentase Terhadap Anggaran (%)
66.700.000	57.207.815	85,77

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung IKU tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus ada sebesar Rp. 66.700.000,-. Sampai akhir triwulan III, jumlah anggaran yang terserap sebesar

Rp. 57.207.815,- atau sekitar 85,77% dari total alokasi anggaran Tahun 2023. Penyerapan anggaran untuk IKU ini pada Triwulan digunakan untuk honorium pengurus/penyimpan BMN tingkat kuasa, biaya perjalanan dinas dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan barang milik Negara lingkup DJPT TA.2023 di Jakarta.

2) Sumber Daya Manusia

SDM yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini ada sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang PNS dengan jabatan pengelola BMN dan 3 (tiga) orang adalah Pramubakti yang diperbantukan di BMN.

h. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja tingkat kepatuhan BMN, yaitu layanan dukungan manajemen internal melalui komponen pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan komponen operasional dan pemeliharaan kantor. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung capaian indikator ini adalah dengan pengajuan Penetapan Status Penggunaan (PSP), penghapusan aset, penilaian aset, dan penyusunan laporan BMN semester I tahun 2023.

17. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Guna mengetahui kinerja suatu program maka perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKAKL. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Indikator kinerja Nilai IKPA merupakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang diperoleh dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara / Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus.

a. Target dan Realisasi

Tabel 84. Target dan Realisasi Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Indikator Kinerja	Target 2023 (Nilai)	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Persentase Capaian dari Target Tahunan (%)
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	89	-	95,87	-	107,71

Perhitungan capaian IKU Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dilakukan pada periode semesteran, sehingga pada TW III tidak dilakukan perhitungan nilai IKPA di PPS Bungus. Namun, jika dilihat berdasarkan data pada tabel, diketahui bahwa nilai IKPA PPS Bungus sampai dengan semester satu adalah sebesar 95,87 ATAU 107,71% dari total target tahunan. Pehitunagn nilai IKPA PPS Bungus akan dilakukan pada Triwulan IV tahun 2023.

b. Perbandingan Pada Tahun 2022 Pada Periode yang sama

Tabel 85. Perbandingan Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Pada Tahun 2022 Pada Periode yang Sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Kenaikan/Penurunan (%)
	2022	2023	2022	2023	
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	-	-	-	-	-

Perhitungan capaian IKU Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah semesteran sehingga untuk triwulan III Tahun 2023 belum dapat dihitung dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022.

c. Perbandingan dengan target Menengah

Tabel 86. Perbandingan Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan Target Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Triwulan II 2023	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	-	89	-

Perhitungan capaian IKU Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah semesteran sehingga untuk triwulan III Tahun 2023 belum dilakukan perhitungan dan tidak dapat dibandingkan dengan target menengah dalam Renstra.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat dibandingkan dengan target Nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Table 87 Perbandingan Nilai IKPA PPS Bungus dengan PPS Belawan

PPS Bungus			PPS Belawan			Selisih Perbandingan
Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase	
-	-	-	-	-	-	-

Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai IKPA PPS Bungus dilakukan dalam periode semesteran. Oleh karena itu, pada Triwulan III tidak dilakukan perhitungan nilai IKPA, yang berarti tidak dapat dilakukan perbandingan dengan satker lain pada saat ini. Perbandingan nilai IKPA PPS Bungus dengan satker lain akan dilakukan pada Triwulan IV tahun 2023.

f. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diukur berdasarkan pencapaian nilai target yang ditetapkan dalam satu tahun, yakni sebesar 89. Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini berhubungan dengan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara / Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pelaksanaan anggaran PPS Bungus Tahun 2023 adalah dengan menyampaikan data kontrak ke KPPN tepat waktu; ketepatan waktu revolving UP; ketepatan penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari return SP2D, memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1). Anggaran

Tabel 88. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Anggaran	Realisasi (Rp.)	Persentase Terhadap Anggaran (%)
115.000.000	80.073.875	69,63

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung IKU ini ada sebesar Rp. 115.000.000,-. Sampai dengan triwulan III, jumlah anggaran yang terserap sebesar Rp. 80.073.875,- atau 69,63% dari total alokasi anggaran Tahun 2023.

2). Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, didukung 6 (enam) orang pegawai yang terdiri dari 2 (dua) orang pengelola keuangan, 1 (satu) orang analis keuangan, 1 (satu) orang Pranata Keuangan APBN Terampil, 1 (satu) orang Analis Pengelola Keuangan APBN Muda, dan 1 (satu) orang Analis Pengelola Keuangan APBN Madya.

h. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator kinerja ini adalah program dukungan manajemen internal, dengan komponen layanan perencanaan dan penganggaran.

Beberapa usaha yang dilakukan pada semester I yaitu melakukan revisi halaman III DIPA, penyampaian data kontrak ke KPPN tepat waktu; ketepatan waktu revolving UP; ketepatan penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari return SP2D, memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai, serta melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi penyerapan anggaran.

18. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

IKU Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan

- Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai - capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.
- Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup DJPT kedalam aplikasi SMART DJA.

a. Target dan Realisasi

Tabel 89. Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Indikator Kinerja	Target 2023 (Nilai)	Target TW III (Nilai)	Realisasi TW III (Nilai)	Persentase Capaian TW III (%)	Persentase Capaian dari Target Tahunan (%)
Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	82	-	-	-	-

Perhitungan capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah tahunan sehingga untuk triwulan III Tahun 2023 belum dapat dihitung.

b. Perbandingan Pada Tahun 2022 Pada Periode yang sama

Tabel 90. Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Pada tahun 2022 Pada Periode yang Sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Kenaikan/Penurunan (%)
	2022	2023	2022	2023	
Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	-	-	-	-	-

Perhitungan capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah tahunan sehingga untuk triwulan III Tahun 2023 belum dapat dihitung dan dibandingkan dengan tahun 2022.

c. Perbandingan dengan target Menengah

Tabel 91. Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan target Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Triwulan III	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	-	-	-

Perhitungan capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah tahunan sehingga untuk triwulan III Tahun 2023 belum dapat dihitung. IKU ini juga tidak terdapat dalam Renstra 2020-2024 sehingga dan tidak dapat dibandingkan dengan target menengah dalam Renstra.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat dibandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Tabel 92 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran PPS Bungus dengan PPS Belawan

PPS Bungus			PPS Belawan			Selisih Perbandingan
Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase	
82	-	-	82	-	-	-

Perbandingan indikator Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus belum dapat dilakukan pada triwulan III, karena pengukuran indikator ini adalah tahunan. Perbandingan akan dilakukan pada triwulan IV tahun 2023.

f. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor-faktor pendukung tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran yaitu adanya peningkatan penyerapan anggaran, Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap perencanaan, capaian realisasi output, serta efisiensi dan nilai efisiensi anggaran. Untuk tahun 2023, pengisian capaian rincian output tidak lagi dilakukan pada aplikasi SMART DJA, namun melalui aplikasi SAKTI yang akhirnya terintegrasi pada aplikasi SMART DJA.

Faktor penghambat pencapaian IKU Nilai Kinerja Anggaran PPS Bungus adalah efisiensi dan nilai efisiensi anggaran yang biasanya berbanding terbalik dengan optimalisasi penyerapan anggaran.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1) Anggaran

Tabel 93. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Anggaran	Realisasi (Rp.)	Persentase Terhadap Anggaran (%)
44.000.000	31.800.327	72,27

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung IKU ini ada sebesar Rp. 44.000.000,-. Sampai dengan triwulan III, jumlah anggaran yang terserap sebesar Rp. 31.800.327,- atau sekitar 72,27% dari total alokasi anggaran Tahun 2023. Penyerapan anggaran untuk IKU ini pada triwulan III digunakan untuk kegiatan monev dan pelaporan program pengelolaan perikanan tangkap.

2) Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja nilai kinerja anggaran PPS Bungus, didukung oleh 2 (dua) orang pegawai yang terdiri dari 1 (satu) orang APK APBN Muda yang melakukan inputing realisasi capaian output di Aplikasi SAKTI, dan 1 (satu) orang analis kepegawaian yang mendapatkan penugasan sebagai operator SMART DJA.

h. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas adalah kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam menunjang kinerja anggaran pada Triwulan III tahun 2023 adalah pelaksanaan penginputan data realisasi capaian output pada aplikasi SAKTI dan pengisian Laporan Triwulan III tahun 2023 pada aplikasi SMART DJA.

A. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 14.890.401.000,- sesuai dengan DIPA PPS Bungus Tangkap TA. 2022 Nomor: SP DIPA- 032.03.2.531488/2023 tanggal 30 November 2022, alokasi anggaran tersebut untuk 5 (lima) kegiatan yakni :

1. Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
3. Pengelolaan perizinan dan Kenelayanan;
4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
5. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan.

Realisasi anggaran sampai Triwulan III tahun 2023 adalah sebesar Rp. 10.802.304.670,- atau sebesar 72,55 persen dari pagu sebesar Rp. 14.890.401.000,-.

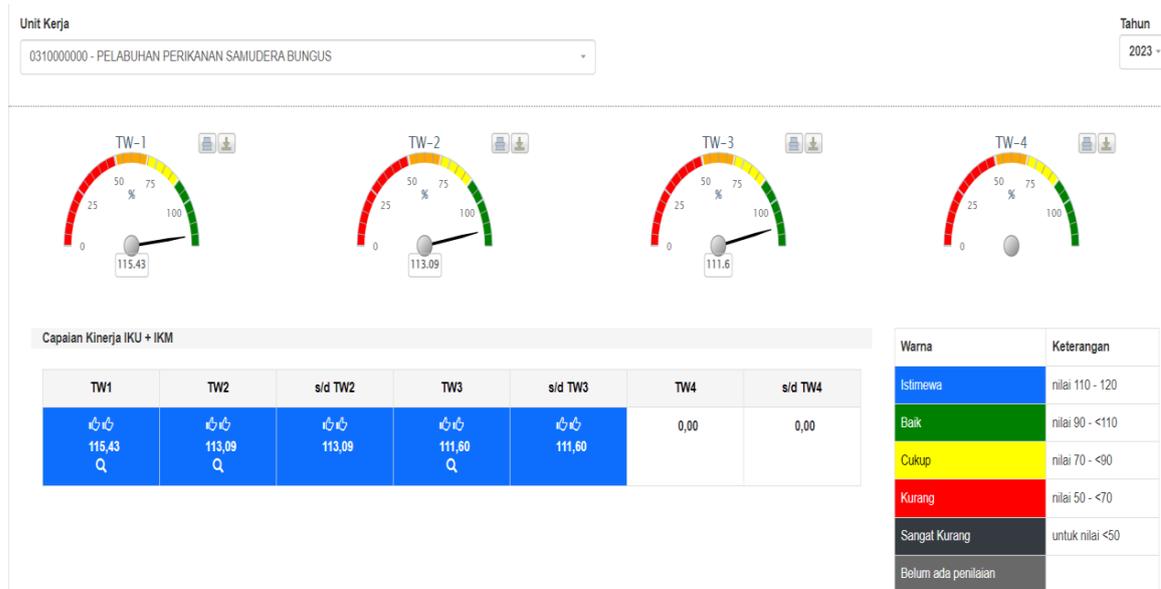
Tabel 94. Realisasi Penyerapan Anggaran Untuk Pelaksanaan Kegiatan PPS Bungus Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran 2023 (Rp.)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		3.132.266.000,-	516.803.305,-	16,50%
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	376.400.000,-	104.317.894,-	27,71%
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	2.597.616.000,-	1.305.419.653,-	50,25%
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000,-	1.800.000,-	43%
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	154.250.000,-	89.244.428,-	57,86%
Program Dukungan Manajemen		11.758.135.000,-		
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	11.758.135.000,-	9.301.522.695,-	79,11%

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja PPS Bungus selama tahun 2023 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KINERJAKU), diperoleh Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Ditjen Perikanan Tangkap sebesar 111,60 persen.



Gambar 4. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS)

Dari hasil pengukuran kinerja Dirjen Perikanan Tangkap dan UPT PPS Bungus s/d Triwulan III Tahun 2023 melalui pencapaian target indikator kinerja yang di input ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, semua Indikator Kinerja yang ditetapkan telah mencapai nilai/angka lebih atau diatas 100%.

4.2. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan pencapaian indikator kinerja sebagaimana pada Bab 3, hal-hal yang dapat disarankan untuk peningkatan kinerja guna pencapaian target tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan segala potensi, baik SDM maupun sarana dan prasarana PPS Bungus guna mencapai target yang direncanakan;
2. Mendorong antusiasme pegawai dengan melakukan pembinaan dan himbauan melalui apel pagi kepada pegawai PPS Bungus, agar mengikuti pelatihan yang tersedia. Mengoptimalkan anggaran guna mencapai output sesuai program yang telah ditetapkan.

Sebagai sebuah gambaran kinerja, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menyajikan keseluruhan profil kinerja PPS Bungus secara utuh. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan Laporan Kinerja PPS Bungus Tahun 2023 masih belum sempurna. Oleh karenanya, perbaikan-perbaikan perlu segera dilakukan, utamanya menyangkut perbaikan terhadap indikator-indikator kinerja dan pengumpulan data yang lebih sistematis dan terstruktur.

Semoga Laporan Kinerja PPS Bungus Tahun 2023 ini dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja PPS Bungus Tahun 2023 dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja PPS Bungus pada tahun selanjutnya.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Rencana Kinerja

UNIT KERJA : PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
TAHUN : 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	1	Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta)	1.337
2.	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	5.770
3.	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	3	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	50
4.	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	4	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	1
		5	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan (orang)	30
5.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal	6	Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur (Unit)	1
6.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berdaya saing	7	Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	83
		8	Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya (Lembaga)	2
7.	Pengelolaan kenelayan yang maju dan berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	9	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	20
8.	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	10	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (Lembaga)	1
		11	Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan (Laporan)	220
9.	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	12	Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan (nilai)	45,10
		13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	75
		14	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	93
		15	IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	80
		16	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	77,5
		17	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	77,5
		18	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	89
19	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	82		